

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD
DI SEKTOR PEMERINTAHAN
(Studi Kasus pada OPD Kabupaten Seruyan)**

Disusun Oleh:

Titis Widhiani

NIM. 175020307111010

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Akuntansi*



JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Seruyan)

Yang disusun oleh:

Nama : Titis Widhiani

NIM : 175020307111010

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Malang, 31 Mei 2021
Dosen Pembimbing

Dr. Dra. Lilik Purwanti, M.Si., Ak.

NIP. 196407091991032007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD
DI SEKTOR PEMERINTAHAN
(Studi Kasus pada OPD Kabupaten Seruyan)**

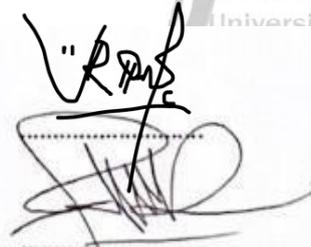
Yang disusun oleh:

Nama : Titis Widhiani
 NIM : 175020307111010
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 31 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Dra. Lilik Purwanti, M.Si., Ak.
 NIP. 19640709 1991032 007
 (Dosen Pembimbing)
2. Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MS.
 NIP. 19691231 2009121 002
 (Dosen Penguji I)
3. Nurlita Novianti, MSA., Ak., CA.
 NIP. 19871113 201903 2 009
 (Dosen Penguji II)




Malang, 29 Juni 2021
 Ketua Prodi Studi S1 Akuntansi



Dra. Arum Prastiwi M.Si., Ak.
 NIP 196407091991032007



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titis Widhiani
NIM : 175020307111010
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD
DI SEKTOR PEMERINTAHAN
(Studi Kasus pada OPD Kabupaten Seruyan)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 31 Mei 2021
Pembuat Pernyataan,



Titis Widhiani
NIM.175020307111010

ABSTRAK

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN
(Studi Kasus pada OPD Kabupaten Seruyan)**

Oleh:

Titis Widhiyani

Dosen Pembimbing: Dr. Dra. Lilik Purwanti, M.Si., Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal, peluang, moralitas individu, penegakan hukum dan gaya kepemimpinan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan regresi linear berganda aplikasi SPSS. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada OPD Kabupaten Seruyan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peluang dan moralitas individu berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sedangkan sistem pengendalian internal, penegakan hukum dan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan.

Kata Kunci: *Fraud*, Gaya Kepemimpinan, Moralitas Individu, Peluang, Penegakan Hukum, Sistem Pengendalian Internal.

ABSTRACT

**AN ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING FRAUDS IN THE GOVERNMENT
SECTOR**

(A Case Study on the Local Government Organization of Seruyan District)

By:

Titis Widhiyani

Advisor Lecturer: Dr. Dra. Lilik Purwanti, M.Si., Ak.

This study aims to determine the empirical evidence of the effect of internal control systems, opportunities, individual morality, law enforcement and leadership styles on fraud in the government sector. This study applies quantitative approach in which the data are collected through questionnaires and analyzed by multiple linear regression utilizing SPSS software. The respondents in this study are the Civil Servants of OPD (Regional Apparatus Organization) of Seruyan Regency. The results of this study reveal that individual opportunity and morality affect fraud in the government sector, while the internal control system, law enforcement and leadership style do not affect fraud in the government sector.

Keywords: Fraud, Leadership Style, Individual Morality, Opportunity, Law Enforcement, Internal Control System.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 <i>Fraud Triangle Theory</i>	11
2.1.2 <i>Fraud</i> (Kecurangan)	13
2.1.3 Sistem Pengendalian Internal	16
2.1.4 Moralitas Individu	19
2.1.5 Penegakan Hukum	19
2.1.6 Gaya Kepemimpinan	20
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Hipotesis Penelitian	25
2.3.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintahan	25
2.3.2 Pengaruh Peluang Kecurangan Terhadap <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintahan	25
2.3.3 Pengaruh Moralitas Individu Terhadap <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintahan	27



2.3.4	Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintahan.....	27
2.3.5	Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap <i>Fraud</i> Di Sektor Pemerintahan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....		31
3.1	Jenis Penelitian.....	31
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian.....	31
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	33
3.3.1	Variabel <i>Dependen</i>	33
3.3.2	Variabel <i>Independen</i>	34
3.4	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5	Metode Analisis Data.....	39
3.6	Statistik Deskriptif.....	40
3.7	Uji Kualitas Data.....	40
3.7.1	Uji Validitas.....	40
3.7.2	Uji Reliabilitas.....	40
3.8	Uji Asumsi Klasik.....	41
3.9	Analisis Regresi.....	43
3.9.1	Uji Koefisien Determinasi.....	44
3.9.2	Uji t.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		45
4.1.	Hasil Penelitian.....	45
4.2.	Statistik Deskriptif.....	49
4.3	Uji Kualitas data.....	51
4.3.1	Uji Validitas.....	51
4.3.2	Uji Reliabilitas.....	54
4.4	Uji Asumsi Klasik.....	55
4.5	Hasil Uji Hipotesa.....	58
4.5.1	Uji Koefisien Determinasi R^2 (<i>R Square</i>).....	58
4.5.2	Uji t.....	58
4.6	Pembahasan Hasil Penelitian.....	62
4.6.1	Sistem Pengendalian Internal.....	62
4.6.2	Peluang.....	63

4.6.3 Moralitas Individu..... 64

4.6.4 Penegakan Hukum..... 66

4.6.5 Gaya Kepemimpinan..... 67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 69

5.1 Kesimpulan..... 69

5.2 Keterbatasan Penelitian..... 70

5.3 Saran..... 70

Daftar Pustaka..... 71

LAMPIRAN..... 76



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rencana OPD yang akan dijadikan sampel 33

Tabel 4. 1 OPD yang dijadikan sampel..... 46

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden 48

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden 49

Tabel 4. 4 Rentang Sekala..... 50

Tabel 4. 5 Rentang Skala Setiap Variabel..... 50

Tabel 4. 6 Uji Validitas 52

Tabel 4. 7 Uji Reliabilitas 54

Tabel 4. 8 Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov 55

Tabel 4. 9 Uji Multikolinearitas 56

Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi 58

Tabel 4. 11 Uji t 59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 11
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual 29
Gambar 4. 1 Grafik Scatterplot 57



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	77
LAMPIRAN 2	86
LAMPIRAN 3	91
LAMPIRAN 4	95
LAMPIRAN 5	97





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Instansi pemerintahan mempunyai peran penting dalam pembangunan negeri ini. Meskipun demikian, tingkat kecurangan (*Fraud*) kecurangan dari tahun ke tahun yang melibatkan pegawai di instansi pemerintahan terus melonjak naik.

Tingginya *Fraud* di instansi pemerintahan disebabkan oleh sistem birokrasi yang berbelit-belit serta kurang transparan, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal, penyalahgunaan jabatan, dan tekanan yang tinggi.

Kecurangan (*fraud*) secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Pramudita, 2013). Secara umum, bentuk kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi di pemerintahan adalah praktik korupsi. Korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini berkembang dimasyarakat. Menurut UU 31/1999 Jo No. 20/2001, terdapat tujuh jenis korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan. Menurut *Transparency International* Indonesia mengenai *Corruption Perception Index* pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa terjadi suatu penurunan/kemerosotan mengenai upaya pemberantasan korupsi oleh sebagian besar negara dan Indonesia berada di posisi 85 dari 185 negara yang

disurvei. Indonesia berada di posisi tersebut turut difasilitasi oleh tingginya korupsi yang terjadi di kalangan birokrasi, DPRD dan pemerintah.

Dalam laporan tahunan yang diterbitkan KPK mengenai pemberantasan korupsi berdasarkan data dari tahun 2012 sampai 2015, menunjukkan bahwa terdapat 178 kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melibatkan 16 orang Gubernur dan 51 orang Bupati/Walikota. Otonomi Daerah yang pada awalnya bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah justru dijadikan untuk melakukan korupsi oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (2018) terdapat beberapa pola korupsi yang dilakukan pemerintah daerah melalui putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap (*incracht*) serta dalam proses upaya hukum dengan beberapa sebagai berikut: Pola korupsi yang pertama berkaitan dengan perizinan di sektor pertambangan dan migas, kehutanan, tata ruang dan pertanahan. Pola korupsi yang kedua berkaitan dengan fungsi DPRD-Legislati, anggaran serta pengawasan terhadap upaya pelaksanaan kebijakan. Pola korupsi yang ketiga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Pola korupsi yang keempat berkaitan dengan promosi, mutasi dan suap jabatan. Dan Pola terakhir berkaitan dengan dana desa yang merupakan pola mutakhir. Berdasarkan kelima pola tersebut, pola korupsi yang sering terjadi di daerah adalah upaya pelemahan pengawasan yang dijalankan oleh DPRD dengan cara memberi suap untuk memperoleh alokasi dana dari APBD dan manipulasi kebijakan melalui perubahan peraturan daerah.

Korupsi yang terus meningkat dan melibatkan pejabat pemerintahan pusat maupun daerah mulai menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah negeri ini. Berbagai upaya dilakukan untuk memutus rantai korupsi, baik dengan meningkatkan sistem pengendalian maupun dengan upaya penegakan hukum seadil-adilnya. Kebanyakan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pemerintahan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Terjadinya *fraud* di lingkungan pemerintah disebabkan adanya kesempatan, pembenaran dan tekanan. Hal ini sesuai dengan teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey tahun 1953. Berdasarkan teori *Fraud Triangle* yang pertama kali dikembangkan oleh Cressey (1953) mengatakan bahwa *Fraud* disebabkan oleh tiga faktor, yaitu tekanan (*preassure*), peluang (*opportunity*) dan pembenaran (*rationalization*).

Tekanan (*pressure*) adalah motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan disebabkan oleh kondisi ekonomi, gaya hidup konsumtif, serta tekanan internal yang berkaitan dengan lingkungan pribadi dan lingkungan organisasi yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Menurut penelitian Hormati & Pesudo (2019) Tekanan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Peluang (*opportunity*) adalah Situasi atau kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurang (*fraud*). Peluang merupakan elemen kecurangan yang dapat dihindari atau dikurangi dengan menerapkan prosedur, pengendalian, proses, dan deteksi dini kemungkinan terjadinya kecurangan, karena peluang biasanya disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, kurangnya pengawasan

dan/atau penyalahgunaan kewenangan (Albrecht et al., 2012). Menurut penelitian Susandra & Hartina (2017) peluang merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan kecenderungan *fraud* di sektor pemerintahan. Peluang bisa terjadi apabila terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian organisasi yang menyebabkan seseorang memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kecurangan.

Rasionalisasi (*Rasionalization*) adalah sikap atau pemikiran untuk melakukan pembenaran akan tindakan yang dilakukannya dan menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan suatu hal yang normal. Pelaku kecurangan (*fraud*) cenderung membenarkan perbuatannya dengan berbagai alasan misalnya dia merasa bahwa gaji yang diterimanya tidak setimpal dengan beban kerjanya sehingga mengambil sedikit keuntungan dari asset organisasi merupakan hal yang wajar. Mencari pembenaran sebenarnya adalah motivasi terkuat seseorang untuk melakukan kecurangan untuk mempertahankan dirinya agar tetap dipercaya dan merupakan naluri alamiah (Tuanakotta, 2018:212).

Gaya kepemimpinan dalam organisasi juga mempengaruhi bagaimana kepemimpinan seseorang membangun organisasi dengan lingkungan internal yang kondusif sehingga tercipta kinerja yang optimal dalam pencapaian tujuan instansi (Bayangkara, 2017). Di dalam pemerintahan gaya kepemimpinan tentunya akan menjadi cerminan bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Kecurangan yang terjadi di sektor pemerintahan sering kali berhubungan erat dengan gaya kepemimpinan yang menyalahgunakan wewenang untuk mendapat keuntungan. Misalnya ada tarif yang harus dibayarkan seseorang untuk mendapatkan proyek yang dibiayai oleh

APBD. Korupsi yang seperti ini tentunya akan menjadi turun temurun dilakukan oleh para bawahan pemerintahan ketika mereka memegang tampuk kepemimpinan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Panggabean (2016) mengenai gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap *fraud* yang menunjukkan bahwa semakin meningkat kualitas gaya kepemimpinan akan menurunkan terjadinya *fraud*.

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan di pemerintahan. Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan lapran keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2013) dan Panggabean (2016) sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Sehingga, sistem pengendalian internal yang baik akan mencegah terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Kecurangan sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berkembang dimasyarakat. Perilaku kecurangan terjadi karena adanya motivasi atau dorongan yang muncul dalam diri individu. Dengan adanya moralitas individu akan mencegah seseorang untuk melakukan kecurangan (Wuryastuti et al., 2018).

Penelitian Firdaus (2018) Moralitas Individu berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan apabila suatu

individu memiliki moralitas yang baik dan memiliki kepribadian yang jujur, meskipun pengendalian internal suatu organisasi lemah maka individu tersebut tetap akan enggan untuk melakukan kecurangan.

Beragam aturan hukum sudah diciptakan guna menekan tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia. Namun, pelaku kecurangan tetap saja sering mengabaikan aturan hukum yang ada. Berdasarkan Penelitian Firdaus (2018) Penegakan Hukum tidak berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Hal ini sejalan dengan peneltian Pramudita (2013) Penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, tegas atau tidaknya penegakan hukum dalam suatu organisasi tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan (*fraud*). Berbeda dengan hasil penelitian Najahningrum (2013) Penegekan hukum berpengaruh terhadap kecurangan di sektor pemerintahan dan didukung oleh penelitian Usman (2017) Penegakan Hukum berpengaruh signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Semakin efektif penegakan hukum dalam organisasi akan meminimalisir tingkat terjadinya kecurangan.

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu daerah di provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki kasus kecurangan melibatkan pemerintah daerah. Terdapat beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Seruyan antara lain kasus suap untuk memperlancar APBD tahun 2014 dimana 6 anggota DPRD Kabupaten Seruyan dan PLT Sekertaris Daerah sebagai tersangka (PROKAL.CO, 2015).

Selain itu terdapat kasus korupsi proyek pengadaan pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung Kabupaten Seruyan yang melibatkan mantan bupati seruyan

periode 2003-2013 dan Direktur PT Swa Karya Jaya yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 20,84 miliar (kpk.go.id, 2019).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Firdaus (2018) yang meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan (*Fraud*) pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Pemerintahan di Kabupaten Klaten) yang menguji pengaruh asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi dan moralitas individu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan variabel pengaruh sistem pengendalian internal, peluang kecurangan, moralitas individu, penegakan hukum, dan gaya kepemimpinan. Peneliti tidak menggunakan variabel asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi karena peneliti ingin meneliti faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* di sektor pemerintahan dengan menambahkan variabel sistem pengendalian internal, peluang dan gaya kepemimpinan. Penelitian ini diharapkan dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya melalui obyek dan beberapa variabel yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa ada pengaruh sistem pengendalian internal terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?
2. Apa ada pengaruh peluang kecurangan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?
3. Apa ada pengaruh moralitas individu terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?

4. Apa ada pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?

5. Apa ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap *fraud* di sektor pemerintahan
2. Pengaruh peluang kecurangan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan
3. Pengaruh moralitas individu terhadap *fraud* di sektor pemerintahan
4. Pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintahan
5. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teori

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau bacaan, khususnya bagi pihak yang mengadakan penelitian mengenai pengendalian internal, peluang kecurangan, moralitas individu, penegakan hukum, gaya kepemimpinan dan *fraud* di instansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan mampu digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam meneliti di bidang terkait.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya mencegah serta menekan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESA

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, sumber dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari analisis data penelitian dan pengujian hipotesis, serta menjabarkan pembahasan terkait pengujian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan, keterbatasan serta saran penelitian.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



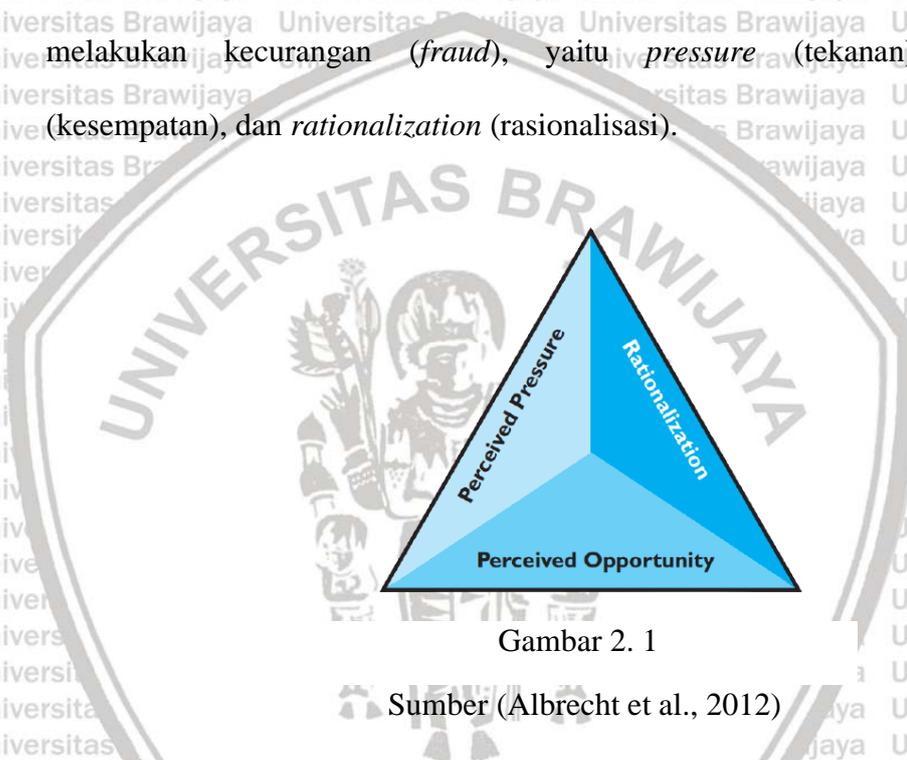
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Fraud Triangle Theory*

Teori ini dikemukakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Cressey, terdapat 3 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan (*fraud*), yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi).



Gambar 2. 1

Sumber (Albrecht et al., 2012)

Pressure (Tekanan) merupakan motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan disebabkan oleh kondisi ekonomi, gaya hidup konsumtif, serta tekanan internal yang berkaitan dengan lingkungan pribadi dan lingkungan organisasi yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Cressey mengatakan bahwa seseorang yang melakukan kecurangan biasanya memiliki masalah keuangan yang menghimpit hidupnya sehingga membuat nyamerasa tertekan (Tuanakotta, 2018:207).

Opportunity (Peluang) adalah salah satu situasi atau kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurang (*fraud*). Peluang bisa terjadi apabila terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian organisasi yang menyebabkan seseorang memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kecurangan. Cressey berpendapat, ada dua komponen dari persepsi tentang peluang ini. Pertama, *general information*, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar atau lihat, misalnya dari pengalaman orang lain yang melakukan *fraud* dan tidak ketahuan atau tidak dihukum atau kena sanksi. Kedua *technical skill* atau keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Misalnya, orang yang dipercaya untuk mengisi cek yang akan ditandatangani atasannya, membuat *fraud* yang berkaitan dengan pengisian cek (Tuanakotta, 2018:211).

Didi & Kusuma (2018) berpendapat bahwa *opportunity* juga tercipta dari lemahnya penegakan peraturan yang dilakukan oleh instansi sehingga tidak menimbulkan efek jera. Berdasarkan penelitian Susandra & Hartina (2017) yang meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bogor, peluang merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan kecenderungan *fraud* di sektor pemerintahan.

Rationalization (rasionalisasi) merupakan keadaan dimana individu atau kelompok yang melakukan *fraud* sering kali mencari pembenaran atas tindakannya yang berhubungan dengan kecurangan (Tuanakotta, 2018:212). Pada umumnya, seseorang yang melakukan kecurangan, merasa tindakannya bukan termasuk

kecurangan, tetapi hal itu merupakan haknya atau biasanya orang tersebut melakukan *fraud* karena mengikuti orang-orang sekitar yang melakukan hal itu.

Contohnya berbohong dianggap bukan *fraud* karena banyak orang berbohong tidak diberi hukuman apapun.

2.1.2 *Fraud* (Kecurangan)

Menurut Pramudita (2013) secara umum, kecurangan merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh internal dan/atau eksternal suatu organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang secara langsung merugikan pihak lain. Sistem hukum dapat menjadi *fraud* ketika adanya suatu tindakan atau kelalaian yang diperhitungkan akan mengakibatkan hilangnya sifat imparial institusi. Secara khusus, korupsi terjadi ketika pejabat lembaga mencari atau memperoleh keuntungan dalam bentuk apa pun terkait dengan penggunaan kekuasaan atau tindakan lain. Orang awam sering beranggapan secara sempit bahwa kecurangan (*fraud*) itu kriminal atau korupsi.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud* sebagai berikut:

1. Pasal 362 tentang pencurian (definisi KUHP: “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”);
2. Pasal 364 tentang Pemerasan dan Pengancam (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”);

3. Pasal 372 tentang Penggelapan (definisi KUHP: “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”);

4. Pasal 378 tentang Perbuatan Curang (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”);

5. Pasal 396 tentang Merugikan Pemberi Piutang dalam Keadaan Pailit (Tuanakotta, 2018:194).

Standar-standar audit mendefinisikan kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu atau lebih individu dalam suatu entitas yang melakukan penipuan untuk mendapat keuntungan ilegal (Hayes, Wallage, & Gortemaker, 2017:230). *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menggambarkan *fraud* dalam bentuk *fraud tree* yang mempunyai tiga cabang utama yaitu *corruption*, *asset misappropriation* dan *fraudulent statement*.

Corruption (Korupsi) menurut *ACFE* sedikit berbeda dengan istilah korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. *ACFE* membagi korupsi menjadi empat bentuk yaitu:

1. *Conflicts of Interest* (Konflik Kepentingan) merupakan benturan kepentingan yang terjadi ketika seorang pegawai bertindak atas nama kepentingan pihak ketiga selama melakukan pekerjaannya atau atas nama kepentingan diri sendiri dalam pengambilan keputusan tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi instansi organisasi.
2. *Bribery* (Penyuapan) adalah tindakan pemberian suatu imbalan atau hadiah kepada pihak tertentu untuk mendapatkan suatu keuntungan secara ilegal.
3. *Illegal Gratuities* (Persenan ilegal) merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Persenan ilegal juga pemberian hadiah, penerimaan, penawaran, atau permohonan sesuatu yang berharga misalnya kenaikan pangkat atau jabatan.
4. *Economic Extortion* (Pemerasan ekonomi) merupakan tindakan berupa ancaman kepada seorang individu atau organisasi untuk mendapatkan suatu yang berharga seperti uang, informasi atau kerjasama perusahaan.

Korupsi umumnya didefinisikan adalah penyalahgunaan jabatan di sketor pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Korupsi yang didefinisikan seperti itu misalnya, penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat, *kickbacks* dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyuapan dan pencurian dana-dana pemerintahan (Tuanakotta, 2018:196).

Asset Misappropriation (Pengambilan aset) secara ilegal oleh seseorang yang biasanya memiliki wewenang untuk mengelola aset suatu instansi yang digunakan untuk keuntungan pribadi. *Asset misappropriation* dilakukan dalam tiga bentuk yaitu *skimming*, *larceny*, dan *fraudulent disbursement*. *Skimming* merupakan

pencurian kas yang dilakukan sebelum uang masuk secara fisik ke dalam instansi organisasi. *Larency* merupakan pencurian kas yang dilakukan setelah masuk ke dalam pencatatan perusahaan karena lemahnya pengendalian internal terkait perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of asset*). Sedangkan *fraudulent disbursement* merupakan penggelapan yang dilakukan Ketika arus kas atau uang sudah tercatat dalam sistem instansi organisasi (Tuanakotta, 2018:199).

Menurut Tuanakotta (2018:203) *Fraudulent Statement* merupakan kecurangan yang berkenaan dengan penyajian laporan keuangan. *Fraud* jenis ini biasanya berupa salah saji (*misstatements* baik *overstatement* maupun *understatement*), selain itu juga penyajian aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (*asset/revenue understatements*).

Fraud Tree yang dibuat oleh ACFE sangat berguna dalam pemetaan *fraud* yang terjadi di lingkungan kerja. Pelaku *fraud* di Indonesia tentunya sering kali lebih kreatif dalam melakukan aksinya. Berdasarkan klasifikasi *fraud* dalam *fraud tree*, faktor penyebab *corruption*, *misappropriation of asset* dan *fraudulent financial statement* ialah lemah atau tidaknya pengendalian internal.

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan *The Committee of Sponsoring Organization* (*COSO*) pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan dewan, manajemen serta pegawai yang berfungsi untuk memberikan *assurance* yang memadai (*reasonable assurance*) dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, reabilitas dari pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap

peraturan dan regulasi yang berlaku (Hayes et al., 2017:260). Pengendalian internal menurut COSO terdiri atas lima komponen yang saling terkait, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*Control environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan tindakan, kebijakan dan prosedur yang merefleksikan keseluruhan top manajemen, direktur, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas.

2. Penilaian risiko (*Risk assessment*)

Penilaian risiko dalam sistem pengendalian internal merupakan usaha manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan terhadap penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

3. Aktivitas pengendalian (*Control activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang diciptakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan. Aktivitas pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, pendokumentasian dan pencatatan yang cukup, pengawasan aset antara catatan dan fisik, serta pemeriksaan independen atas kinerja.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)

Informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal adalah metode yang dipergunakan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan semua transaksi entitas, serta untuk mempertahankan akuntabilitas yang berhubungan dengan aset.

5. Pemantauan

Pemantauan dalam pengendalian internal adalah penilaian yang dilakukan manajemen secara berkala terkait efektifitas rancangan dan operasi dari struktur pengendalian internal untuk menentukan apakah aktivitas operasi berjalan seperti apa yang diharapkan dan dimodifikasi jika diperlukan.

Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen pemerintahan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu pemerintah dalam menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek ke hati-hatian (Permatasari et al., 2017).

Sistem pengendalian internal yang efektif dalam intansi pemerintahan tentunya memberikan pagar untuk membatasi, menghalangi, atau menutup akses para pelaku kecurangan. Tuanakotta (2018:278) berpendapat bahwa sistem pengendalian internal dibagi menjadi dua, yaitu sistem pengendalian internal aktif dan pasif. Tujuan pengendalian internal aktif dan pengendalian internal pasif sama, yakni mencegah terjadinya *fraud*. Dalam pengendalian internal aktif dibuat bermacam-macam lapisan pengamanan, sebelum pelaku *fraud* bisa menembus keamanan. Sedangkan dalam pengendalian internal pasif, dari permukaan tidak ada pengamanan namun ada peredam yang membuat pelaku *fraud* akan jera.

2.1.4 Moralitas Individu

Menurut Bertens, moralitas (dari kata sifat latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Kita berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk (Eliza, 2015).

Berdasarkan penelitian Liyanarachchi & Newdick (2009) penalaran moral individu berpengaruh terhadap perilaku etis mereka. Individu dengan moral tinggi cenderung melakukan *whistle blwoing* serta memiliki perilaku etis. Dengan demikian, ketika seseorang memiliki moral individu yang baik berada di situasi praktik yang menyimpang, mereka akan menghindari bahkan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sebaliknya, Ketika moral individu rendah maka seseorang berpotensi untuk memiliki dan terdorong untuk melakukan perilaku yang tidak etis. Firdaus (2018) Orang dengan level penalaran moral yang rendah akan berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi delima etika. Dalam tindakanya, orang yang memiliki level penalaran rendah cenderung akan melakukan hal hal yang menguntungkan dirinya sendiri.

2.1.5 Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan norma hukum dan peraturan dalam suatu negara sehingga tercipta keadilan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kecurangan umumnya tindakan ilegal yang dilakukan oleh orang-orang secara internal dan/atau eksternal organisasi untuk

mendapatkan kepentingan pribadi dan/atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain. Sistem hukum atau penegakan hukum dapat menjadi *fraud* ketika adanya suatu tindakan atau kelalaian yang diperhitungkan akan mengakibatkan hilangnya sifat imprisal institusi (Pramudita, 2013).

Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada disuatu negara.

Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhi. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi *fraud* disektor pemerintahan (Zulkarnain, 2013).

Menurut Firdaus (2018) penegakan hukum adalah proses yang dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi *fraud* di sektor pemerintahan. Penegakan hukum yang kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran atau kecurangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tegak penegakan hukum dalam suatu organisasi atau instansi, maka kecenderungan kecurangan yang mungkin terjadi juga akan semakin rendah.

2.1.6 Gaya Kepemimpinan

Menurut (Inaray et al., 2016) kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi yang baik dengan tujuan untuk membuat orang agar dengan penuh pengertian dan senang hati bersedia mengikuti

kehendak pimpinan itu. Namun demikian, pemimpin memiliki tiga faktor keterbatasan yaitu, Pengetahuan dan keterampilan pemimpin itu sendiri, keterampilan anak buah dan lingkungan kerja. Kepemimpinan dalam suatu instansi berperan penting dalam membangun organisasi dengan lingkungan internal yang kondusif sehingga tercipta kinerja yang optimal dalam pencapaian tujuan instansi (Bayangkara, 2017:284). Gaya kepemimpinan memiliki peran penting dalam memahami perilaku kelompok karena biasanya pemimpin yang akan mengarahkan kita menuju tujuan organisasi.

Menurut Robbins & Judge terdapat empat jenis gaya kepemimpinan kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan kharismatik, gaya kepemimpinan transaksional, gaya kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan visioner. "Pertama, gaya kepemimpinan kharismatik mempengaruhi pegawai dengan memperlihatkan kemampuan heroik atau tidak biasa saat sedang memimpin. Kedua, gaya kepemimpinan transaksional memotivasi pegawai untuk menuju pada tujuan yang telah ditetapkan dengan memperjelas pemisahan tugas. Ketiga, gaya kepemimpinan transformasional menginspirasi para pegawai untuk mencapai kepentingan pribadi pegawai dan membawa dampak yang luar biasa bagi para pegawai. Keempat, gaya kepemimpinan visioner diartikan sebagai gaya kepemimpinan yang mampu menciptakan dan mendeskripsikan visi yang realistis, menarik dan kredibel tentang masa depan suatu organisasi yang sedang berkembang." (Wijayanto, 2020)

Gaya kepemimpinan ini mengacu pada gaya kepemimpinan transaksional yang memotivasi pegawai untuk menuju pada tujuan organisasi dengan

memperjelas pemisahan tugasnya. Menurut Zulkarnain (2013) gaya kepemimpinan yang buruk akan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, sehingga menyebabkan karyawan cenderung merugikan perusahaannya. Tindakan korupsi itu mudah dilakukan di birokrasi dikarenakan kesalahan pemimpin dalam menempatkan staf di unit-unit kerja di lingkungan pemerintahan. Akibatnya, ruang untuk terjadinya tindakan korupsi terbuka lebar. Seharusnya seorang pemimpin menempatkan orang/karyawan sesuai dengan profesi dan tempat yang benar. Keberhasilan penerapan gaya kepemimpinan di instansi pemerintah dikarenakan oleh hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan, dimana pemimpin telah menyampaikan pembagian tugas dengan baik sehingga proses komunikasi yang baik dalam suatu instansi mengakibatkan proses penyampaian informasi baik dari atasan kepada bawahan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Pramudita (2013) yang berjudul analisis *fraud* di sektor pemerintahan Kota Salatiga. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal dan gaya kepemimpinan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, dan tidak terdapat pengaruh antara penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Pane (2018) meneliti pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan terhadap kecurangan: Survei pada pemprov Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap perilaku kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

baik penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di satu instansi pemerintahan dapat menekan atau mengurangi terjadinya tindak kecurangan.

Didi & Kusuma (2018) dalam penelitiannya yang berjudul faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*): Persepsi pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor, menghasilkan temuan bahwa *internal control* dan penegakan peraturan memiliki pengaruh terhadap *fraud*.

Susandra & Hartina (2017) melakukan penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bogor. Hasil penelitian ini bahwa *opportunity* (peluang) berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* di Dinas Kota Bogor.

Menurut penelitian (Permatasari et al., 2017) dalam penelitiannya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan (Studi pada pegawai keuangan pemerintah Kabupaten Banyuwangi). Keefektifan sistem pengendalian, tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan gaya kepemimpinan dan penegakan hukum memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Zulkarnain (2013) dalam penelitian yang berjudul analisis faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* pada dinas Kota Surakarta. Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh negatif gaya kepemimpinan dan sistem pengendalian internal

terhadap *fraud*. Selain itu, Tidak terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud* disektor pemerintahan.

Dalam penelitian Usman (2017) yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di Sektor Pemerintahan (Studi pada SKPD Kabupaten Luwu Utara). Hasil Penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Damayanti (2016) dalam penelitian yang berjudul pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu terhadap kecurangan akuntansi (Studi eksperimen pada pegawai bagian keuangan dan akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel independen pengendalian internal memiliki efek terhadap kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi. Selain itu, kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi akan lebih tinggi dilakukan oleh orang dengan level moralitas individu rendah dibandingkan dengan yang memiliki level moralitas individu tinggi.

Prawira (2014) meneliti pengaruh moralitas individu, asimetri informasi dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi (Studi empiris pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap *fraud*, ini juga mengindikasikan bahwa individu yang memiliki level penalaran moral rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi untuk keuntungann pribadi. Kebalikannya, orang dengan level penalaran moral yang tinggi cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi baik dalam kondisi terdapat elemen pengendalian

internal maupun dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal di organisasi.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mencegah *fraud* di sektor pemerintahan. Sistem pengendalian internal yang efektif dalam instansi pemerintahan tentunya memberikan pagar untuk membatasi, menghalangi, atau menutup akses para pelaku kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi di pemerintahan di Indonesia adalah korupsi.

Penelitian Zulkarnain (2013), Pramudita (2013) dan Pane (2018) menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecederungan *fraud* di sektor pemerintahan. Berdasarkan kondisi ini, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan

2.3.2 Pengaruh Peluang Kecurangan Terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan.

Opportunity (Peluang) adalah salah satu situasi atau kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*). Peluang bisa terjadi apabila terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian organisasi yang menyebabkan seseorang memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kecurangan. Cressey berpendapat, ada dua komponen dari persepsi tentang peluang ini. Pertama, general information, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung trust atau

kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar atau lihat, misalnya dari pengalaman orang lain yang melakukan *fraud* dan tidak ketahuan atau tidak dihukum atau kena sanksi. Kedua *technical skill* atau keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Misalnya, orang yang dipercaya untuk mengisi cek yang akan ditandatangani atasannya, membuat *fraud* yang berkaitan dengan pengisian cek (Tuanakotta, 2018:211).

Kecurangan juga banyak disebabkan oleh terbukanya peluang untuk melakukan tindakan tersebut. Peluang bisa terjadi apabila terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian organisasi yang menyebabkan seseorang memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kecurangan. Kewenangan yang dimiliki oleh aparat pemerintahan seringkali digunakan sebagai peluang untuk memanfaatkan keadaan agar mendapat keuntungan pribadi. Sudah menjadi rahasia umum peluang ini dijadikan ladang untuk mencari tambahan pendapatan.

Berdasarkan penelitian Susandra & Hartina (2017) peluang berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Semakin tinggi tingkat peluang dalam suatu instansi dapat menjadi sebuah motivasi untuk melakukan kecurangan.

Hal ini disebabkan karena peluang yang ada timbul dari monopoli kekuasaan serta wewenang pejabat yang absolut tanpa adanya mekanisme pertanggung jawaban, hubungan personal antara pemimpin dan bawahannya. Berdasarkan kondisi ini, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₂: Peluang berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan

2.3.3 Pengaruh Moralitas Individu Terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan.

Moralitas individu secara tidak langsung juga berhubungan erat dengan kecenderungan *fraud* yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam suatu pemerintahan. Masyarakat akan menilai bahwa seorang individu bermoral jika tindakan dan perilakunya mencerminkan moralitas individu itu sendiri, yaitu dalam segala tindakannya dapat membedakan hal yang baik dan buruk.

Moralitas Individu tiap orang yang bekerja di dalam suatu pemerintahan harus dapat menentukan perbuatan mana yang baik atau buruk untuk masyarakat, pemerintah dan dirinya sendiri. Kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akan lebih tinggi dilakukan oleh orang dengan level moralitas individu rendah dibandingkan dengan yang memiliki level moralitas individu tinggi Damayanti, (2016). Berdasarkan kondisi ini, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃: Moralitas Individu berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan

2.3.4 Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan

Kecurangan merupakan tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam instansi pemerintah apabila penegakan hukum yang berlaku lemah maka akan membuka ruang untuk para pelaku kecurangan. Kebanyakan dari pelaku kecurangan mengerti tentang hukum tetapi tetap melakukan tindakan yang

melawan hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang berjalan sesuai dengan prosedur akan menekan terjadi kecurangan di sektor pemerintahan.

Penelitian Usman (2017) menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sedangkan penelitian Pramudita (2013) dan Zulkarnain (2013) menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Berdasarkan kondisi ini, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₄: Penegakan hukum berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan

2.3.5 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap *Fraud* Di Sektor Pemerintahan

Lingkungan pemerintahan dalam menjalankan kebijakan tentunya tidak luput dari arahan seorang pemimpin. Pegawai cenderung menjadikan seorang pemimpin sebagai figur contoh dalam menjalankan tugasnya. Gaya kepemimpinan sangat memiliki peran dalam membangun budaya organisasi yang baik serta lingkungan kerja yang etis.

Membangun lingkungan kerja yang etis diperlukan gaya kepemimpinan yang baik, sehingga diharapkan dapat menekan kecenderungan terjadi kecurangan.

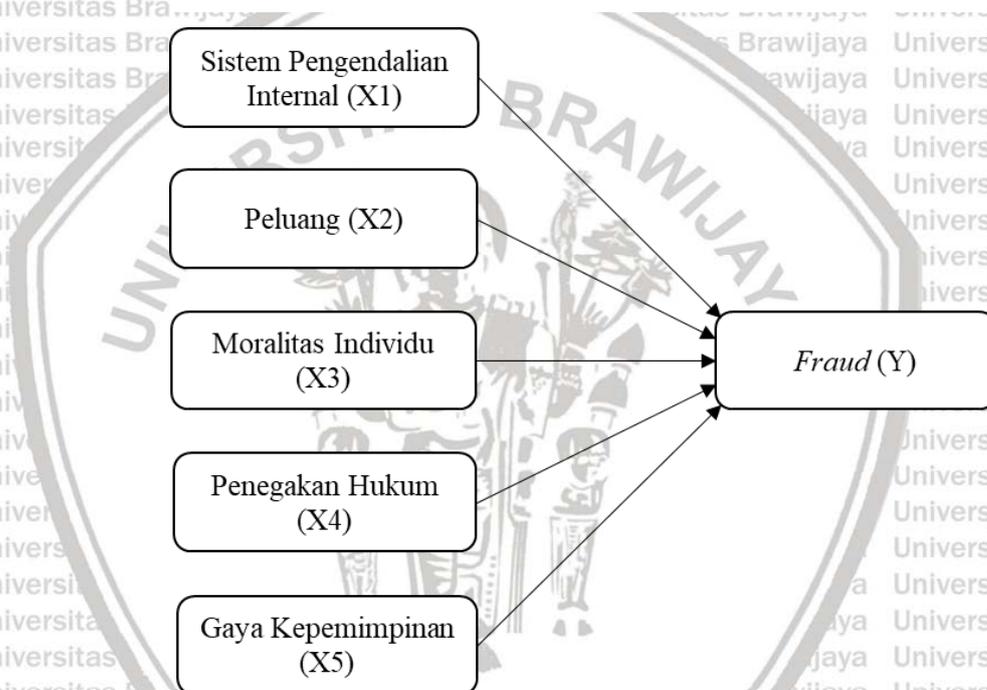
Penelitian Permatasari et al. (2017) dan Pramudita (2013) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Berdasarkan kondisi ini, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₅: Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka dan hipotesa yang telah diterangkan di atas, maka kerangka konseptual dapat digambarkan bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal, peluang, moralitas individu, penegakan hukum, dan gaya kepemimpinan terhadap *fraud* sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual



Masing-masing variabel dalam penelitian ini berdasarkan teori *fraud triangle* yang menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan (*fraud*), yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Sistem pengendalian internal yang efektif dalam intansi pemerintahan tentunya memberikan pagar untuk membatasi, menghalangi, atau menutup akses para pelaku kecurangan. Peluang bisa terjadi apabila terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian organisasi yang

menyebabkan seseorang memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kecurangan (Tuanakotta, 2018:211). Moralitas (dari kata sifat latin moralis) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Kita berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk.

Sistem hukum atau penegakan hukum dapat menjadi *fraud* ketika adanya suatu tindakan atau kelalaian yang diperhitungkan akan mengakibatkan hilangnya sifat imprisal institusi (Pramudita, 2013). Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi yang baik dengan tujuan untuk membuat orang agar dengan penuh pengertian dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu (Inaray et al., 2016). Masing-masing variabel dalam penelitian ini berkaitan dengan faktor terjadinya *fraud* berdasarkan teori *fraud triangle*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian menurut Sekaran & Bougie (2018:2) adalah proses untuk menemukan solusi dari suatu masalah dengan melakukan studi secara menyeluruh serta menganalisis situasi masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel sistem pengendalian internal, peluang, moralitas individu, penegakan hukum dan gaya kepemimpinan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan mengumpulkan dan menganalisis data, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2019:16).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019:127) “Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas:obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di OPD di Kabupaten Seruyan yang berjumlah 3.107. Jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan data profil kepegawaian Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019.

Sugiyono (2019:127) menyatakan “Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu". Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019:133).

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Masa kerja minimal 2 tahun
3. Jabatan sebagai kasubbag, kasi, bendahara pengeluaran dan staf keuangan

Kriteria sampel ini akan disertakan dalam kuesioner yang akan dibagikan kepada PNS yang bekerja di OPD Kabupaten Seruyan. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} = \frac{3.107}{1+3.107(0,1)^2} = \frac{3.107}{32,07} = 97$$

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = standar error (10%)

Berdasarkan rumus slovin di atas, diperoleh jumlah sampel sebesar 97 orang responden. Kuesioner yang akan disebarkan nantinya diperbanyak dari jumlah sampel yakni berjumlah 140 kuesioner dengan memperhitungkan terjadinya *error* seperti tidak terisinya kuesioner secara lengkap atau kuesioner yang tidak dikembalikan.

Tabel 3. 1 Rencana OPD yang akan dijadikan sampel

NO	Nama OPD
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Dinas Perhubungan
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Dinas Pendidikan
6	Dinas Sosial
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Inspektorat
13	Kecamatan Seruyan Hilir
14	Kecamatan Seruyan Hilir Timur

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel *Dependen*

Menurut Sugiyono (2019:69) “Variabel dependen: sering disebut sebagai output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas?”. Dalam Penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah *fraud* di sektor pemerintahan.

Fraud di sektor pemerintahan adalah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel *Fraud* mengacu pada

pertanyaan dalam penelitian (Firdaus, 2018). Variabel ini diukur dengan menggunakan sekala likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam menyawab pertanyaan dari kuesioner dalam penelitian ini skala likert yang diberikan berkisar dari 1 sampai 5. Jawaban yang didapat diberi skor nilai (5) sangat setuju, (4) setuju (3) netral (2) tidak setuju (1) sangat tidak setuju. Variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Kecenderungan untuk memanipulasi, memalsukan atau melakukan perubahan catatan akuntansi
2. Kecenderungan untuk melakukan salah saji transaksi atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan
3. Kecenderungan untuk sengaja melakukan kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi.
4. Kecenderungan untuk melakukan kesalahan penyajian laporan keuangan akibat pencurian aset yang membuat barang/jasa tidak diterima
5. Kecenderungan untuk menyajikan laporan keuangan yang salah karena tindakan yang tidak seharusnya terhadap aset disertai dokumen palsu.

3.3.2 Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2019:69) “Variabel independen: variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri dari sistem pengendalian internal, peluang, motivasi individu, penegakan hukum dan gaya kepemimpinan.

Variabel ini diukur dengan menggunakan sekala likert. Dalam menyawab pertanyaan dari kuesioner dalam penelitian ini skala likert yang diberikan berkisar dari 1 sampai 5. Jawaban yang didapat diberi skor nilai (5) sangat setuju, (4) setuju (3) netral (2) tidak setuju (1) sangat tidak setuju.

1. Sistem pengendalian internal (X_1)

Sistem pengendalian internal adalah Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan salah satu instrument penting dalam upaya mencegah *fraud* di sektor pemerintahan. Sistem pengendalian internal yang efektif dalam instansi pemerintahan tentunya memberikan pagar untuk membatasi, menghalangi, atau menutup akses para pelaku kecurangan.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal terdiri dari lima pertanyaan yang mengacu pada Panggabean (2016) Indikator pengukuran variabel sistem pengendalian internal meliputi:

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian risiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. pemantauan

2. Peluang (X_2)

Peluang adalah salah satu situasi atau kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurang (*fraud*). Peluang bisa terjadi apabila terdapat kelemahan dalam sistem

pengendalian organisasi yang menyebabkan seseorang memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kecurangan. Kewenangan yang dimiliki oleh aparat pemerintahan seringkali digunakan sebagai peluang untuk memanfaatkan keadaan agar mendapat keuntungan pribadi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel peluang terdiri dari 6 pertanyaan mengacu pada pertanyaan yang digunakan Fuadi (2016) dengan indikator sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran
- b. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas dari suatu hasil.
- c. Kegagalan dalam mendisiplinkan pelaku kecurangan
- d. Kurangnya akses informasi.
- e. Ketidaktahuan, apatis, atau ketidakpedulian, dan kemampuan yang tidak memadai dari pihak yang dirugikan
- f. Kurangnya pemeriksaan

3. **Moralitas individu (X₃)**

Berdasarkan penelitian Liyanarachchi dan Newdick (2009) penalaran moral individu berpengaruh terhadap perilaku etis mereka. Individu dengan moral tinggi cenderung melakukan *whistle blwoing* serta memiliki perilaku etis. Dengan demikian, ketika seseorang memiliki moral individu yang baik berada di situasi praktik yang menyimpang, mereka akan menghindari bahkan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Pengukuran variabel moralitas individu menggunakan instrumen pertanyaan melalui kasus dilema etika akuntansi yang mengacu pada penelitian Firdaus (2018) dengan indikator sebagai berikut:

- a. moralitas pimpinan dalam menyelesaikan LRA untuk kepentingan sendiri

- c. moralitas pimpinan menyuap staf akuntansi
- d. moralitas pimpinan dalam memerintah menyelesaikan LRA yang tidak sesuai kenyataan
- e. moralitas pimpinan dalam menyusun LRA seperti periode sebelumnya
- f. moralitas pimpinan dalam menyusun LRA sesuai aturan karena takut sanksi UU

4. Penegakan hukum (X₄)

Kecurangan merupakan tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam instansi pemerintah apabila penegakan hukum yang berlaku lemah maka akan membuka ruang untuk para pelaku kecurangan. Kebanyakan dari pelaku kecurangan mengerti tentang hukum tetapi tetap melakukan tindakan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang berjalan sesuai dengan prosedur akan menekan terjadi kecurangan di sektor pemerintahan.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penegakan hukum terdiri dari 5 pertanyaan yang dikembangkan oleh Pramudita (2013). Variabel diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Daya tanggap pejabat penerimaan lambat
- b. Proses penepengakan hukum pidana selesai
- c. Putusan pengadilan sesuai dengan fakta-fakta hukum
- d. Aturan hukum dalam instansi
- e. Ketaatan terhadap hukum

5. Gaya kepemimpinan (X₅)

Lingkungan pemerintahan dalam menjalankan kebijakan tentunya tidak luput dari arahan seorang pemimpin. Pegawai cenderung menjadikan seorang pemimpin sebagai figur contoh dalam menjalankan tugasnya. Gaya kepemimpinan sangat memiliki peran dalam membangun budaya organisasi yang baik serta lingkungan kerja yang etis. Oleh karena itu, untuk membangun lingkungan kerja yang etis diperlukan gaya kepemimpinan yang baik, sehingga diharapkan dapat menekan kecenderungan terjadi kecurangan. Instrumen pengukuran variabel gaya kepemimpinan menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Pramudita (2013). Variabel Diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Pimpinan menghargai bawahan
- b. Pimpinan menentukan tujuan yang realistis
- c. Pimpinan memberikan arah dan tujuan yang diinginkan
- d. Pimpinan memberikan inspirasi
- e. Pimpinan memberi penghargaan

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan subyek digunakan dalam penelitian. Sumber data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder dapat diperoleh dari sumber primer atau sekunder. Data primer (*primary data*) data mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti terkait dengan tujuan penelitian. Data sekunder (*secondary data*) mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada untuk mendukung data primer (Sekaran & Bougie, 2018;130). Sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan pada PNS yang bekerja di OPD Kabupaten Seruyan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan disertakan dalam kuesioner sebanyak 140. Kuesioner dibagikan diperbanyak dari jumlah sampel yang diperlukan dengan memperhitungkan terjadinya *error* pada kuesioner seperti tidak terisi secara lengkap atau tidak kembali.

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner.

Sugiyono (2019:199) menyatakan “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Kuesioner yang digunakan dalam

penelitian ini berisikan set pertanyaan terkait persepsi pegawai pemerintahan terkait

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan disektor

pemerintahan. Kuesioner tersebut disebarkan secara langsung kepada responden

yaitu kasubbag, kasi, bendahara pengeluaran dan staf keuangan pegawai negeri sipil

yang bekerja pada OPD Kabupaten Seruyan untuk kemudian di isi sesuai dengan

persepsi responden.

3.5 Metode Analisis Data

Metode Analisis analisis data merupakan kegiatan mengolah data menjadi

informasi yang bersumber dari responden atau sumber data lain. Metode analisis

data dalam penelitian ini menggunakan alat analisis statistik deskriptif, uji kualitas

data, uji asumsi klasik dan Analisis Regresi.

3.6 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018:19) Statistik Deskriptif merupakan Teknik analisis data yang dilakukan dengan memberikan gambaran atau deskripsi yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menunjukkan karakteristik sampel data penelitian.

3.7 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang di gunakan valid atau *reliable* karena kualitas penelitian sangat berpengaruh dengan data yang digunakan. Uji kualitas data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan Uji Validitas dan Realibilitas.

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji kelayakan kuesioner apakah setiap item pertanyaan valid atau tidak. Uji validitas dilakukan dengan SPSS dengan analisis realibilitas melalui output *item total statistics* pada kolom total correlation.

Item layak digunakan apabila nilai koefisien korelasi $\geq 0,3$. Sedangkan nilai koefisien korelasi di bawah 0,3 maka dianggap tidak layak digunakan (Priyastama, 2017:168).

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam penelitian. Uji reliabilitas dilakukan dengan teknik *cronbach alpha* yang dilihat dari hasil *output reliability statistics*. Untuk menentukan apakah alat ukur reliabel atau tidak dapat dilihat dari hasil output spss dengan nilai *cronbach alpha* $\geq 0,6$. Apabila

hasil dari output diketahui bahwa nilai *cronbach alpha* $< 0,6$ maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut kurang baik (Priyastama, 2017:170).

3.8 Uji Asumsi Klasik

Jika model regresi linier memenuhi asumsi klasik, maka disebut model yang baik. Asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah residual berdistribusi normal, tidak ada multikolinieritas, tidak ada heteroskedastisitas, dan tidak ada autokorelasi.

Asumsi klasik harus dipenuhi untuk mendapatkan model regresi dengan estimasi yang tidak bias (Priyastama, 2017:116).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji nilai residual yang dihasilkan dengan regresi distribusi normal atau non normal. Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik *normal P-P plot of Regression*, bila titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut normal. Selain itu, dapat dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, apabila output yang dihasilkan memperlihatkan bahwa nilai signifikansi sebesar $> 0,05$ maka nilai residual tersebut normal (Priyastama, 2017:117).

Penelitian ini menggunakan analisis statistik *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_A : Data residual berdistribusi tidak normal

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan dengan Uji K-S, jika nilai (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data residual terdistribusi normal. Sedangkan apabila nilai (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2018:167).

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel independen dalam model regresi.

Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antara variabel independen (korelasinya 1 atau mendekati). Selain itu, dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Inflation Factor* (VIF), atau membandingkan nilai masing-masing koefisien determinasi dengan nilai yang ditentukan secara bersamaan. Cara mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi antara lain:

- a. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independent. Apabila di antara variabel independent terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya $\geq 0,90$), maka terdapat indikasi adanya multikolinearitas.
- b. Multikolinieritas juga bisa dilihat melalui nilai *Tolerance* dan *Inflation Factor* (VIF). Nilai *Tolerance* harus $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2018:108).

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat kondisi ketidaksamaan variansi dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik tidak memiliki heteroskedastisitas (Ghozali,

2018:137). Uji Heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melihat pola titik pada Scatterplot.

Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika terdapat pola berarti telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, dan titik-titik tersebut tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:138).

3.9 Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Menurut Priyastama (2017:154) regresi linier berganda merupakan analisis yang mengukur besarnya pengaruh antara dua variabel independen terhadap variabel dependen dan menggunakan variabel independen untuk memprediksi variabel dependen.

Persamaan Analisis berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Dimana:

Y = Kecurangan (*fraud*)

α = Konstanta

β_1-5 = Koefisien Regresi

X1 = Sistem Pengendalian Internal

X2 = Peluang

X3 = Moralitas Individu

X4 = Penegakan Hukum

X5 = Gaya Kepemimpinan

e = Error

3.9.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai mendekati satu artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Priyastama, 2017:160).

3.9.2 Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen menjelaskan variasi dependen. Menurut Ghozali (2018:99) uji t dilakukan dengan dua cara antara lain:

1. Quick look : bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka ketika nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut), H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen secara terpisah.
 2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa variabel independent secara individual akan mempengaruhi variabel dependen.
- t Hitung > t Tabel dan Sig < 0,05 maka H_a diterima dan menolak H_0
 t Hitung < t Tabel dan Sig > 0.05 maka H_a ditolak dan menerima H_0

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan obyek PNS yang bekerja pada OPD Kabupaten Seruyan yang memegang jabatan sebagai kassubag, kasi, bendahara pengeluaran dan staff bagian keuangan dengan ukuran sampel berdasarkan rumus Slovin sebanyak 97 orang. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang disebarakan kepada 14 OPD di Kabupaten Seruyan sejumlah 140 kuesioner. Masing-masing kuesioner yang telah disebarakan secara langsung kepada OPD kabupaten seruyan telah dilengkapi dengan kriteria sampel. Kuesioner dibagikan diperbanyak dari jumlah sampel dengan pertimbangan terjadinya *error* pada kuesioner seperti tidak terisi secara lengkap atau tidak kembali.

Kuesioner dibagikan oleh peneliti dalam waktu 3 minggu. Pada minggu pertama kuesioner dibagikan sebanyak 100 dengan masing-masing OPD diberikan 10 kuesioner kepada responden yang sesuai dengan kriteria. Pada minggu kedua sejumlah kuesioner telah dikembalikan dan sebagian tidak kembali. Untuk memenuhi jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti kembali menyebarkan sejumlah 40 kuesioner kepada 4 OPD yang kemudian dibagikan kepada responden terkait yang sesuai dengan kriteria sampel. Minggu ketiga seluruh kuesioner yang diperlukan telah kembali dan mencukupi sesuai dengan sampel yang diperlukan. Berikut tingkat pengembalian kuesioner yang sesuai dengan kriteria serta OPD yang dijadikan sampel pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1 OPD yang dijadikan sampel

NO	Nama OPD	Kuesioner yang diberikan	Kuesioner yang dikembalikan	Kuesioner yang dapat diolah
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10	10	8
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	10	10
3	Dinas Perhubungan	10	10	10
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	8	8
5	Dinas Pendidikan	10	5	3
6	Dinas Sosial	10	10	10
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	10	2	1
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	10	10	10

9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10	7	7
10	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah	10	10	10
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	7	5
12	Inspektorat	10	10	9
13	Kecamatan Seruyan Hilir	10	6	6
14	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	10	6	6

Berdasarkan tabel 4.1. kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah 140 kepada responden. Jumlah Kuesioner yang kembali sebanyak 111 dan terdapat 103 kuesioner yang bisa diolah datanya untuk penelitian ini. Jumlah kuesioner sudah sangat mencukupi karena data yang diperlukan untuk diolah sesuai dengan ukuran sampel yang diperlukan yaitu sebanyak 97. Kuesioner ini kemudian diolah datanya dengan menggunakan SPSS. Berikut karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini pada tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden

No.	Karakteristik Responden	Jumlah	Presentasi
Jenis Kelamin			
1	Laki-Laki	52	54%
2	Perempuan	45	46%
Usia			
1	23 – 30	0	0%
2	31 – 40	38	39%
3	41 – 50	54	56%
4	> 50	5	5%
Masa Kerja			
1	< 5	0	3%
2	6 – 10	32	23%
3	11 – 17	62	57%
4	> 17	3	17%

Berdasarkan tabel 4.2 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa sebanyak 52 orang (54%) berjenis kelamin laki-laki dan 45 orang (46%) berjenis kelamin perempuan. Responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 38 orang (39%), usia 41-50 tahun sebanyak 54 orang (56%), dan usia lebih dari 50 tahun sejumlah 5 orang (5%). Mayoritas responden telah bekerja 11 sampai 17 tahun, 32 responden telah bekerja 6 sampai 10 tahun, dan 3 responden bekerja lebih dari 17 tahun.

4.2. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menunjukkan karakteristik sampel data penelitian. Berikut gambaran hasil uji statistik deskriptif.

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y_Farud	97	9	31	16,60	5,295
X1_SPI	97	6	27	23,29	3,048
X2_Peluang	97	6	25	11,18	3,942
X3_Moralitas	97	6	30	17,93	5,205
X4_Hukum	97	11	25	19,98	2,850
X5_Kepemimpinan	97	10	25	20,59	2,664
Valid N (listwise)	97				

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.3 bahwa variabel *fraud* memiliki skor minimum jawaban responden sebesar 9, maksimum sebesar 31 dengan rata-rata jawaban sebesar 16,60 dan standar deviasi 5,295. Variabel sistem pengendalian internal memiliki skor minimum jawaban responden sebesar 6, maksimum sebesar 27 dengan rata-rata jawaban sebesar 23,29 dan standar deviasi sebesar 3,048. Variabel peluang memiliki skor jawaban minimum sebesar 6, maksimum sebesar 25, dengan rata-rata sebesar 11,18 dan standar deviasi sebesar 3,942. Variabel moralitas individu memiliki skor jawaban responden minimum sebesar 6, maksimum sebesar 30 dengan rata-rata jawaban sebesar 17,93 dan standar deviasi sebesar 5,205. Variabel penegakan hukum memiliki skor jawaban minimum sebesar 11,

maksimum sebesar 25 dengan rata-rata jawaban sebesar 19,98 dan standar deviasi sebesar 2,850. Variabel gaya kepemimpinan memiliki skor jawaban responden minimum sebesar 10, maksimum sebesar 25, dengan rata-rata jawaban sebesar 20,59 dan standar deviasi sebesar 2,664.

Berdasarkan hasil analisis deksriptif di atas maka dapat dijelaskan rentang skala sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Rentang Sekala

Rentang Skala	<i>Fraud</i>	Sistem Pengendalian Internal	Peluang	Moralitas Individu	Penegakan Hukum	Gaya kepemimpinan
Rendah	< 11	<20	<7	<13	<17	<18
Sedang	11-22	20-26	7-15	13-23	17-23	18-23
Tinggi	>22	> 26	>15	>23	>23	>23

Berdasarkan tabel di atas maka rentang skala setiap variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Rentang Skala Setiap Variabel

No	Variabel	Rentang Skala		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	<i>Fraud</i>	19	65	13
2	Sistem Pengendalian Internal	5	83	9
3	Peluang	6	83	8
4	Moralitas Individu	15	67	15
5	Penegakan Hukum	8	74	15
6	Gaya kepemimpinan	6	73	18

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pada variabel *fraud* sebanyak 19 responden termasuk kategori *fraud* rendah, sebanyak 65 responden termasuk kategori *fraud* sedang dan sebanyak 13 responden termasuk kategori

fraud tinggi. Hal ini bermakna bahwa sebagian besar responden terkadang melakukan *fraud*. Pada variabel sistem pengendalian internal sebanyak 83 responden termasuk dalam kategori sedang dalam pengendalian internal, sebanyak 5 responden termasuk kategori rendah, dan 9 orang termasuk kategori tinggi. Hal ini bermakna bahwa responden dalam sistem pengendalian internal belum maksimal. Pada variabel peluang sebanyak 83 responden termasuk dalam kategori sedang, sebanyak 6 responden termasuk kategori rendah, dan 8 orang termasuk kategori tinggi. Hal ini bermakna peluang terjadinya *fraud* masih tergolong sedang.

Pada variabel moralitas individu sebanyak 67 responden termasuk dalam kategori sedang, sebanyak 15 responden termasuk kategori rendah, dan 15 orang termasuk kategori tinggi. Hal ini bermakna moralitas individu dalam kategori sedang sedang. Pada variabel penegakan hukum sebanyak 74 responden termasuk dalam kategori sedang, sebanyak 8 responden termasuk kategori rendah, dan 15 orang termasuk kategori tinggi. Hal ini bermakna penegakan hukum dalam kategori sedang sedang. Pada variabel gaya kepemimpinan sebanyak 73 responden termasuk dalam kategori sedang, sebanyak 6 responden termasuk kategori rendah, dan 18 orang termasuk kategori tinggi. Hal ini bermakna gaya kepemimpinan termasuk kategori sedang.

4.3 Uji Kualitas data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji kelayakan kuesioner apakah setiap item pertanyaan valid atau tidak. Item layak digunakan apabila nilai koefisien korelasi $\geq 0,3$. Sedangkan nilai koefisien korelasi di bawah 0,3 maka dianggap tidak

layak digunakan (Priyastama, 2017:168). Berikut hasil uji validitas penelitian ini pada tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	Keterangan
<i>Fraud</i>	P1	0,616	Valid
	P2	0,658	Valid
	P3	0,528	Valid
	P4	0,560	Valid
	P5	0,510	Valid
	P6	0,494	Valid
	P7	0,636	Valid
	P8	0,703	Valid
	P9	0,467	Valid
Sistem Pengendalian Internal	P1	0,565	Valid
	P2	0,734	Valid
	P3	0,681	Valid
	P4	0,646	Valid
	P5	0,647	Valid
	P6	0,322	Valid
Peluang	P1	0,669	Valid
	P2	0,609	Valid

	P3	0,554	Valid
	P4	0,482	Valid
	P5	0,559	Valid
	P6	0,559	Valid
	P1	0,707	Valid
	P2	0,697	Valid
Moralitas	P3	0,830	Valid
Individu	P4	0,821	Valid
	P5	0,460	Valid
	P6	0,421	Valid
Penegakan Hukum	P1	0,462	Valid
	P2	0,663	Valid
	P3	0,672	Valid
	P4	0,572	Valid
	P5	0,667	Valid
Gaya Kepemimpinan	P1	0,698	Valid
	P2	0,612	Valid
	P3	0,619	Valid
	P4	0,526	Valid
	P5	0,403	Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan output data tabel 4.6 di atas, semua pertanyaan memiliki nilai koefisien korelasi di atas 0,3 sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan pada masing-masing variabel valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam penelitian.

Uji reliabilitas dilakukan dengan teknik *cronbach alpha* yang dilihat dari hasil *output reliability statistics*. Berikut hasil uji reliabilitas yang dapat dilihat pada tabel

4.7.

Tabel 4. 7 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
<i>Fraud</i>	0,844	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,777	Reliabel
Peluang	0,801	Reliabel
Moralitas Individu	0,862	Reliabel
Penegakan Hukum	0,813	Reliabel
Gaya Kepemimpinan	0,786	Reliabel

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan *output* data tabel 4.7 di atas, semua variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,6$ yang artinya data dapat dikatakan reliabel, sehingga layak digunakan sebagai alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

4.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji nilai residual yang dihasilkan dengan regresi distribusi normal atau non normal. Model regresi yang baik tidak memiliki nilai residual yang berdistribusi normal.

Tabel 4. 8 Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,38442588
Most Extreme Differences	Absolute	,059
	Positive	,049
	Negative	-,059
Test Statistic		,059
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Model regresi dikatakan berdistribusi normal jika nilai sig residual lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2018:167). Berdasarkan tabel 4.6. model regresi ini dikatakan normal karena nilai sig lebih dari 0,05 yaitu 0,200 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini layak digunakan.

2. Uji Multikolinearitas

Model regresi dapat dikatakan tidak memiliki multikolinearitas jika nilai *Tolerance* dan *Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF harus lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada model regresi (Priyastama, 2017:122).

Tabel 4. 9 Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
Sistem Pengendalian Internal	0,870	1,150
Peluang	0,810	1,235
Moralitas Individu	0,934	1,070
Penegakan Hukum	0,633	1,579
Gaya Kepemimpinan	0,760	1,316

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.9 model regresi ini tidak mengalami gejala multikolinearitas karena nilai *Tolerance* dan *VIF* dari ketiga variabel memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:

X1: *Tolerance* = 0,870, *VIF*=1,150

X2: *Tolerance* =0,810, *VIF*=1,235

X3: *Tolerance* =0,934, *VIF*=1,070

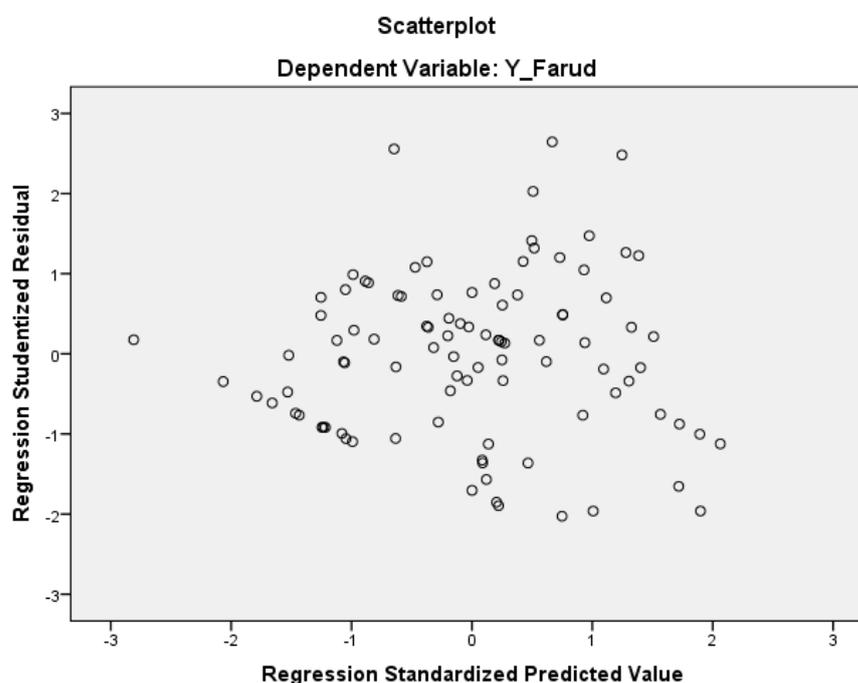
X4: *Tolerance* =0,633, *VIF*=1,579

X5: *Tolerance* =0,760, *VIF*=1,316

3. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat kondisi ketidaksamaan variansi dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam suatu model regresi. Model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, jika tidak tidak ada pola yang jelas pada gambar *scatterplots*, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2018:137–138).

Gambar 4. 1 Grafik Scatterplot



Sumber: Data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik *scatterplot* pada gambar 4.1. Model regresi ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi faktor terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

4.5 Hasil Uji Hipotesa

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi R^2 (R Square)

Penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Berikut merupakan hasil koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,561 ^a	,314	,277	4,503
a. Predictors: (Constant), X5_Kepemimpinan, X3_Moralitas, X2_Peluang, X1_SPI, X4_Hukum				
b. Dependent Variable: Y_Farud				

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.10 disimpulkan bahwa sebesar 31,4% variabel dependen *fraud* dipengaruhi oleh variabel independen yaitu sistem pengendalian internal, peluang moralitas individu, penegakan hukum, dan gaya kepemimpinan dan sisanya sebesar 68,6% dipengaruhi variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini.

4.5.2 Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen menjelaskan variasi dependen. Dasar pengambilan keputusan uji t berdasarkan nilai signifikansi yaitu jika nilai sig. < 0,05, maka variabel X secara

parsial berpengaruh terhadap variabel Y (Ghozali, 2018:99). Hipotesis dapat diterima atau ditolak jika:

1. Jika $t_{\text{Hitung}} > t_{\text{Tabel}}$ dan $\text{Sig} < 0,05$ maka H_a diterima dan menolak H_0
2. Jika $t_{\text{Hitung}} < t_{\text{Tabel}}$ dan $\text{Sig} > 0,05$ maka H_a ditolak dan menerima H_0

Tabel 4. 11 Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4.244	5.511		1.311	.443	
	Sistem Pengendalian Internal	-.163	.162	-.094	-1.009	.316	Ditolak
	Peluang	.546	.130	.470	4.216	.000	Diterima
	Moralitas Individu	.505	.091	.496	5.527	.000	Diterima
	Penegakkan Hukum	.094	.203	.051	.466	.642	Ditolak
	Gaya Kepemimpinan	-.043	.198	-.022	-.219	.827	Ditolak

a. Dependent Variable: *Fraud*

Hasil persamaan regresi berdasarkan tabel di atas sebagai berikut:

$$Y = 4,244 - 0,163 X_1 + 0,546 X_2 + 0,505 X_3 + 0,094 X_4 - 0,043 X_5$$

Keterangan:

Y = Kecurangan (*fraud*)

X₁ = Sistem Pengendalian Internal

X₂ = Peluang

X₃ = Moralitas Individu

X4 = Penegakan Hukum

X5 = Gaya Kepemimpinan

Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa:

- a. Konstanta (a) sebesar 4,244 menunjukkan variabel-variabel independen (Sistem pengendalian internal, peluang, moralitas individu, penegakan hukum, dan gaya kepemimpinan) tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (*Fraud*) adalah sebesar 4,244.
- b. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X1) sebesar $-0,163$ berarti bahwa setiap penurunan sistem pengendalian internal sebesar 1% akan meningkatkan *Fraud* sebesar 16,3%.
- c. Koefisien regresi variabel peluang (X2) sebesar 0,546 berarti bahwa setiap peningkatan peluang sebesar 1% akan meningkatkan *Fraud* sebesar 54,6 %.
- d. Koefisien regresi variabel moralitas individu (X3) sebesar 0,505 berarti bahwa setiap peningkatan moralitas individu sebesar 1% akan meningkatkan *Fraud* sebesar 50,5%. Sebaliknya, Penurunan moralitas individu sebesar 1% akan menurunkan *fraud* sebesar 50,5%.
- e. Koefisien regresi variabel penegakan hukum (X4) sebesar 0,094 berarti bahwa setiap peningkatan penegakan hukum sebesar 1% akan meningkatkan *Fraud* sebesar 9,4%. Sebaliknya, penurunan penegakan hukum sebesar 1% akan meningkatkan *fraud* sebesar 9,4%. Peningkatan yang sejalan antara penegakan hukum dan *fraud* ini biasanya dipicu karena pada kenyataannya penegakan hukum hanya ditekankan pada aspek peraturannya saja tetapi dalam praktik pelaksanaannya masih belum memadai.

- f. Koefisien regresi variabel gaya kepemimpinan (X_5) sebesar $-0,43$ berarti bahwa setiap penurunan gaya kepemimpinan sebesar 1% akan meningkatkan *Fraud* sebesar 4,3%.

Hasil uji t berdasarkan tabel 4.11 adalah sebagai berikut:

1. Diketahui nilai signifikansinya 0,316 lebih besar 0,05 dan nilai t hitung sebesar $-1,009$ lebih kecil dari t tabel sebesar 2,011. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sehingga hipotesis ditolak.
2. Diketahui nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil 0,05 dan nilai t hitung sebesar 4,216 lebih besar dari t tabel sebesar 2,011. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel peluang berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sehingga hipotesis diterima.
3. Diketahui nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil 0,05 dan nilai t hitung sebesar 5,527 lebih besar dari t tabel sebesar 2,011. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel moralitas individu berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sehingga hipotesis diterima. Individu dengan moral tinggi cenderung melakukan *whistle blwoing* serta memiliki perilaku etis. Dengan demikian, ketika seseorang memiliki moral individu yang baik berada di situasi praktik yang menyimpang, mereka akan menghindari bahkan melaporkan kepada pihak yang berwenang.
4. Diketahui nilai signifikansinya 0,642 lebih besar 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,466 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,011. Jadi dapat disimpulkan

bahwa variabel penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sehingga hipotesis ditolak.

5. Diketahui nilai signifikansinya 0,827 lebih besar 0,05 dan nilai t hitung sebesar -0,219 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,011. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sehingga hipotesis ditolak.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Kusumasari (2020) bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Tidak berpengaruhnya sistem pengendalian internal terhadap *fraud* berarti bahwa pengendalian internal di lingkungan pemerintah Kabupaten

Seruyan telah berjalan secara efektif sesuai dengan tujuannya sehingga mampu menekan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Penelitian ini juga sejalan dengan teori yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa sistem Pengendalian Internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dinas pemerintahan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Faisal (2013), Panggabean (2016) dan Cendani (2020) yang menunjukkan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa individu tanpa

pengendalian internal akan lebih mungkin untuk melakukan penipuan akuntansi Individu yang memiliki akses ke elemen pengendalian internal.

Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat membantu pemerintah dalam menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek ke hati-hatian (Permatasari et al., 2017).

4.6.2 Peluang

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peluang berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Susandra & Hartina (2017) bahwa peluang berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemertintahan. Penelitian ini juga sejalan dengan teori *fraud triangle* yang menjelaskan bahwa peluang dapat seseorang untuk melakukan kecurangan disebabkan oleh kondisi ekonomi, gaya hidup konsumtif, serta tekanan internal yang berkaitan dengan lingkungan pribadi dan lingkungan organisasi yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan. Seseorang yang melakukan kecurangan biasanya memiliki masalah keuangan yang menghimpit hidupnya sehingga membuat nya merasa tertekan.

Opportunity (Peluang) adalah salah satu situasi atau kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurang (*fraud*). Peluang bisa terjadi apabila terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian organisasi yang menyebabkan seseorang memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kecurangan. Cressey berpendapat, ada dua komponen dari presepsi tentang peluang ini. Pertama, *general information*,

yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar atau lihat, misalnya dari pengalaman orang lain yang melakukan *fraud* dan tidak diketahui atau tidak dihukum atau kena sanksi. Kedua *technical skill* atau keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Misalnya, orang yang dipercaya untuk mengisi cek yang akan ditandatangani atasannya, membuat *fraud* yang berkaitan dengan pengisian cek (Tuanakotta, 2018:211).

Kebanyakan kasus kecurangan dalam suatu instansi disebabkan oleh gaya hidup yang menimbulkan masalah keuangan. Pelaku kecurangan biasanya sudah mengenal lingkungan kerja dan mengetahui celah atau peluang kecurangan dengan persepsi bahwa resiko tertangkap kecil. Organisasi harus peduli Dan berpartisipasi dalam mengembangkan proses, prosedur dan kontrol, dan tata kelola untuk membuat semua pegawai dalam organisasi tidak memiliki kesempatan melakukan kecurangan dan yang lebih penting adalah dapat mendeteksi kecurangan (Susandra & Hartina, 2017).

4.6.3 Moralitas Individu

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawira (2014) bahwa moralitas individu mempengaruhi kecenderungan terjadinya *fraud*. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspasari & Suwardi (2012) yang menunjukkan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada individu dengan level penalaran moral tinggi untuk tidak melakukan kecurangan

akuntansi, baik dalam kondisi ada maupun tidak ada elemen pengendalian internal di organisasi.

Berpengaruhnya moralitas individu terhadap *fraud* di sektor pemerintahan ini bisa disebabkan oleh tingkat moralitas individu pada setiap orang yang berbeda-beda, sehingga apabila tingkat moralitas individu baik dan jujur maka meskipun pengendalian internal lemah dan peluang kecurangan besar tidak akan mempengaruhinya melakukan kecurangan. Sebaliknya apabila moralitas individu seseorang kurang baik, maka dia akan selalu mencari cara dan celah untuk melakukan kecurangan.

Berdasarkan penelitian Liyanarachchi & Newdick (2009) penalaran moral individu berpengaruh terhadap perilaku etis mereka. Individu dengan moral tinggi cenderung melakukan whistle blwoing serta memiliki perilaku etis. Dengan demikian, ketika seseorang memiliki moral individu yang baik berada di situasi praktik yang menyimpang, mereka akan menghindari bahkan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sebaliknya, Ketika moral individu rendah maka seseorang berpotensi untuk memiliki dan terdorong untuk melakukan perilaku yang tidak etis.

Penelitian ini mendukung teori *fraud* triangle berkaitan dengan faktor rasionalisasi yang merupakan keadaan dimana individu atau kelompok yang melakukan *fraud* sering kali mencari pembenaran atas tindakannya yang berhubungan dengan kecurangan (Tuanakotta, 2018:212). Pada umumnya, seseorang yang melakukan kecurangan, merasa tindakannya bukan termasuk kecurangan, tetapi hal itu merupakan haknya atau biasanya orang tersebut

melakukan *fraud* karena mengikuti orang-orang sekitar yang melakukan hal itu.

Jadi, berpengaruhnya moralitas individu terhadap *fraud* di sektor pemerintahan dikarenakan penalaran moral dari individu yang berbeda.

4.6.4 Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, artinya setiap peningkatan *fraud* di sektor pemerintahan tidak dipengaruhi oleh tegak atau tidaknya hukum yang berlaku. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2013), Zulkarnain (2013) dan Firdaus (2018) menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Tidak berpengaruhnya penegakan hukum terhadap *fraud*. Pramudita (2013), Zulkarnain (2013) menyatakan bahwa keefektifan penegakan hukum belum tentu mampu menekan kecenderungan kecurangan apabila para pegawai yang bekerja di sektor pemerintahan.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Usman (2017) yang menghasilkan bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Menurut Usman (2017) Penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi *fraud* di sektor pemerintahan. Suatu organisasi yang menjalankan sanksi dan peraturan yang tegas terhadap pegawai akan mampu membuat organisasi berjalan secara efektif sehingga dapat menekan terjadinya kecurangan. Penegakan hukum yang kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran atau kecurangan. Jadi, semakin tegak penegakan hukum dalam suatu organisasi atau instansi, maka kecenderungan kecurangan yang mungkin terjadi

juga akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, tidak tegaknya hukum yang ada dalam suatu organisasi atau instansi akan meningkatkan kecenderungan terjadinya kecurangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Hal ini mungkin berkaitan teori *fraud triangle* yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kecurangan akan merasionalisasikan tindakannya sehingga berani melakukan kecurangan meskipun dengan mengabaikan sanksi dan resiko yang akan terjadi dikemudian hari.

4.6.5 Gaya Kepemimpinan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panggabean (2016) dan Zulkarnain (2013) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Tidak berpengaruhnya gaya kepemimpinan terhadap *fraud* ini berarti bahwa kepemimpinan di lingkungan organisasi pemerintahan kabupaten seruyan telah terbangun dengan baik sehingga mampu menekan kecenderungan *fraud* di sektor pemerintahan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Setiawan et al., (2020) yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Penelitian ini juga sejalan dengan teori yang telah dijabarkan sebelumnya terkait keberhasilan penerapan gaya kepemimpinan di instansi pemerintah dikarenakan oleh hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan, dimana pemimpin telah menyampaikan pembagian tugas dengan baik hingga proses

komunikasi yang baik dalam suatu instansi mengakibatkan proses penyampaian informasi baik dari atasan kepada bawahan dan diharapkan dapat mengurangi kecenderungan terjadinya *fraud*.

Secara umum variabel peluang dan moralitas individu yang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud*. Berdasarkan jawaban responden hal ini dapat dikarenakan kurangnya akses informasi, ketidaktahuan, apatis, atau ketidakpedulian, dan kemampuan yang tidak memadai dari pihak yang dirugikan dan kurangnya pemeriksaan.

Sedangkan sistem pengendalian internal, penegakan hukum dan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud*. Hal ini bermakna bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan telah dilaksanakan secara efektif. Sedangkan keefektifan penegakan hukum belum tentu mampu menekan kecenderungan kecurangan apabila para pegawai yang bekerja di sektor pemerintahan. Pada variabel gaya kepemimpinan menunjukkan bahwa pimpinan menghargai bawahan, pimpinan menentukan tujuan yang realistis, pimpinan memberikan arah dan tujuan yang diinginkan, pimpinan memberikan inspirasi dan pimpinan memberi penghargaan. Hal ini didukung dengan nilai rentang skala yang banyak di rentang tinggi pada variabel gaya kepemimpinan dibandingkan variabel yang lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal, peluang, moralitas individu, penegakan hukum dan gaya kepemimpinan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa peluang dan moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* di OPD Kabupaten Seruyan. Sistem pengendalian internal, penegakan hukum dan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* di OPD Kabupaten Seruyan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat peluang terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan Kabupaten Seruyan, hal ini dapat disebabkan pelaku kecurangan biasanya sudah mengenal lingkungan kerja dan mengetahui celah atau peluang kecurangan dengan persepsi bahwa resiko tertangkap kecil. Terjadinya *fraud* di Kabupaten Seruyan juga berkaitan dengan moralitas individu yang bisa disebabkan oleh tingkat moralitas individu pada setiap orang yang berbeda-beda, sehingga apabila tingkat moralitas individu baik dan jujur maka meskipun pengendalian internal lemah dan peluang kecurangan besar tidak akan mempengaruhinya melakukan kecurangan. Sebaliknya apabila moralitas individu seseorang kurang baik, maka dia akan selalu mencari cara dan celah untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu peningkatan sistem pengendalian internal,

penegakan hukum serta gaya kepemimpinan sangat diperlukan untuk menekan terjadinya *fraud* di Kabupaten Seruyan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa R^2 bernilai kecil yang dapat disebabkan oleh pengaruh variabel lain di luar variabel dalam penelitian ini seperti variabel komitmen organisasi dan sistem politik.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan, hasil penelitian ini menunjukkan peluang dan moralitas individu berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, peneliti memberi saran Pemerintah Kabupaten Seruyan sebaiknya lebih memperhatikan peluang-peluang terjadinya *fraud*, dikarenakan memiliki nilai rata-rata terendah dibandingkan yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertegas tugas dan wewenang jabatan agar tidak tumpang tindih.
2. Bagi Peneliti selanjutnya yang meneliti *fraud* di sektor pemerintahan untuk menggunakan variabel independen berkaitan dengan *fraud* di luar variabel dalam penelitian ini seperti komitmen organisasi dan sistem politik serta memperluas sampel penelitian.

Daftar Pustaka

Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012).

Fraud Examination (Fourth). Cengage Learning.

Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana

Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah*

Akuntansi Dan Humanika, 10(2), 160.

<https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>

Bayangkara, I. (2017). *Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi* (2nd ed.).

Salemba Empat.

BPKP. (2016). *Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi*. Badan

Pengawas Keuangan Dan Pembangunan.

[http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-](http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi)

[Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi](http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi)

Cendani, A. A. (2020). PENGARUH MORALITAS INDIVIDU DAN

PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN

KECURANGAN AKUNTANSI PADA BAPPEDA KOTA MAKASSAR

(Studi kasus SKPD kota Makassar). *Orphanet Journal of Rare Diseases*,

21(1), 1–9.

Damayanti, S., & Nadya, D. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal dan

Moralitas Individu Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Nominal, Barometer*

Riset Akuntansi Dan Manajemen, 5.

<https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11725>

Didi, & Kusuma, I. C. (2018). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap*

Produktivitas. 15(January), 1–20.

Eliza, Y. (2015). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal

Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD

di Kota Padang). *E-Jurnal Akuntansi*, 4(1), 86–100.

<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p12>

Faisal, M. (2013). Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus.

Accounting Analysis Journal, 2(1). <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1181>

Firdaus, M. H. Z. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*

Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan/Fraud pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Pemerintahan di Kabupaten Klaten).

Fuadi, M. (2016). Determinan kecurangan Akademik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Dengan Konsep Fraud Triangle.

Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora, 1–200.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (5th ed.).

Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2017). *Prinsip-Prinsip Pengauditan International Standards on Auditing*. Salemba Empat.

Hormati, G. A., & Pesudo, D. A. A. (2019). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi dan Kemampuan Terhadap Kecenderungan Aparatur Sipil

Negara dalam Melakukan Kecurangan Akuntansi Studi Empiris Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Ilmiah*

Akuntansi Dan Humanika, 9(2), 172–190.

Inaray, J. C., Nelwan, O. S., & Lengkong, V. P. K. (2016). Pengaruh

Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt.

Amanah Finance Di Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 459–

470.

International, T. (2020). *Corruption Perceptions Index 2019*. Transparency

International Indonesia. [https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-](https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2019/)

2019/

Juwono, D. V. J., & Mayasari, D. I. (n.d.). *Pola Korupsi Pemerintah Daerah dan*

- Pimpinan Transformasional*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Retrieved November 24, 2020, from <https://www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/782-pola-korupsi-pemerintah-daerah-dan-pimpinan-transformasional>
- Liyanarachchi, G., & Newdick, C. (2009). The impact of moral reasoning and retaliation on whistle-blowing: New Zealand evidence. *Journal of Business Ethics*, 89(1), 37–57. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9983-x>
- Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) : Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Lib.Unes.Ac.Id*, 1–224. <https://lib.unnes.ac.id/18049/>
- No Title*. (2019). Kpk.Go.Id. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1294-kpk-tetapkan-bupati-seruyan-tersangka-kasus-tpk-proyek-pembangunan-pelabuhan>
- Pane, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Perilaku Kecurangan. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 40. <https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1812>
- Panggabean, J. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Karo. *Repositori Institusi UNIVERSITAS SUMATERA UTARA*, 1–15. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/550>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. (2008). BPK RI. http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPIP.pdf
- Permatasari, D. E., Kurrohman, T., & Kartika. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(1), 37–44. journal.ibs.ac.id/index.php/jkp/article/download/71/70
- Pramudita, A. (2013). Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga.

Accounting Analysis Journal, 2(1). <https://doi.org/10.15294/aaaj.v2i1.1156>

Prawira, H. & D. (2014). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganeshha*, 2(1), 1–12.

Priyastama, R. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS. START UP*.

PROKAL.CO. (2015). *Kasus Suap DPRD Rp 2,08 M, Sekda Seruyan Tersangka*. PRO Kalteng.

<https://www.kejaksaan.go.id/infoperkara.php?sec=sd&det=MTM2ODY=&id-su=15&bc=>

Puspasari, N., & Suwardi, E. (2012). PENGARUH MORALITAS INDIVIDU DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI: STUDI EKSPERIMEN PADA KONTEKS PEMERINTAHAN DAERAH. In *Repositori Universitas Gajah Mada*.

Ramadhan, A. (2019). *KPK Tetapkan Eks Bupati Seruyan Tersangka Kasus Korupsi Pelabuhan*. KOMPAS.Com.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/14/19521291/kpk-tetapkan-eks-bupati-seruyan-tersangka-kasus-korupsi-pelabuhan>

Sekaran, U., & Bougie, R. (2018). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (6th ed.). Salemba Empat.

Setiawan, W., Alfianto, N., & Kusumo, W. K. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintah Pada Dinas Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(1), 68. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i1.1505>

Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.

Susandra, F., & Hartina, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 3(2), 35. <https://doi.org/10.30997/jakd.v3i2.987>

Tuanakotta, T. M. (2018). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (2nd ed.).

Salemba Empat.

Usman, S. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN (Studi Pada SKPD Kabupaten Luwu Timur). *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 4, 9–15. <https://lib.unnes.ac.id/18049/>

Wijayanto, F. L. (2020). Komitmen Organisasi, Kapabilitas, Gaya Kepemimpinan dan Kecenderungan Fraud di Sektor Pemerintahan (Persepsi Aparatur Sipil Negara di Kota Salatiga). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 120. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i1.24422>

Wuryastuti, H., Purnamasari, P., & Maemunah, M. (2018). Pengaruh Moralitas Individu dan Motivasi terhadap Kecenderungan Kecurangan. 4(1), 470–475. <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/10367>

Zulkarnain, R. M. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta). In *Accounting Analysis Journal*.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

Kuala Pembuang, 24 Februari 2021

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di Tempat

Nomor Lampiran Perihal :
1 berkas
Permohonan Pengisian
Kuesioner dalam rangka
penelitian untuk penulisan
skripsi strata satu.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir saya sebagai mahasiswa strata satu, maka saya:

Nama : Titis Widhiani

NIM : 175020307111010

Jurusan/ Fakultas : Akuntansi/ Ekonomi dan Bisnis

Saat ini sedang melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Seruyan)”**.

Berkenaan hal tersebut di atas, saya memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenan menjadi responden dan mengisi lembar kuesioner yang saya bagikan dengan kriteria tertulis dibawah ini. Data yang saya peroleh hanya digunakan sebagai kepentingan penelitian dan kerahasiaanya akan dijaga sesuai etika penelitian. Berikut beberapa kriteria responden kuesioner:

1. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Seruyan.
2. Masa kerja minimal 2 tahun
3. Jabatan sebagai kasubbag, kasi, bendahara pengeluaran dan staf keuangan

Apabila Bapak/Ibu/Saudara/i memiliki pertanyaan atau membutuhkan hasil penelitian ini nantinya dapat menghubungi saya melalui email Titiswidhiani@gmail.com.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perkenan Bapak/Ibu/sdra/i membantu dalam pengisian kuesioner saya ini diucapkan banyak terimakasih.

Hormat Saya

Titis Widhiani

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama* :

(boleh tidak diisi)

2. Status Kepegawaian(PNS/Non PNS)
3. Jenis Kelamin
4. Umur (Tahun)
5. Jabatan
6. Masa Kerja(Tahun)
7. Pendidikan Terakhir

Petunjuk Pengisian:

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi pernyataan berikut yang mewakili pendapat umum terkait kondisi di instansi Bapak/Ibu/Saudara/i. Tidak ada pernyataan yang benar atau salah. Bapak/Ibu/Saudara/i mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Bapak/Ibu/Saudara/i setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, dengan memberi tanda checklist (√) pada pilihan yang tersedia sebagai berikut :

Penilaian:

- 1 = Sangat Tidak Setuju 3 = Netral 5 = Sangat Setuju
 2 = Tidak Setuju 4 = Setuju

1. Variabel *Fraud* (Kecurangan)

No.	<i>Fraud</i> (Kecurangan)	1	2	3	4	5
-----	---------------------------	---	---	---	---	---

1	Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila untuk suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya				
2	Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang				
3	Suatu yang wajar bagi instansi saya, apabila untuk tujuan tertentu harga beli peralatan/perlengkapan kantor dicatat lebih tinggi				
4	Merupakan sesuatu yang wajar di instansi saya apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai ke dalam belanja peralatan gedung kantor				
5	Suatu hal yang wajar apabila di instansi saya, para pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan kantor				
6	Bukan suatu masalah bagi instansi saya apabila perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dibeli				
7	Tidak menjadi suatu masalah bagi instansi saya apabila suatu transaksi memiliki bukti pendukung ganda				
8	Suatu hal yang wajar apabila di instansi saya ditemukan adanya pengeluaran tanpa dokumen pendukung				

9	Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila sisa anggaran dibagikan kepada pegawai sebagai bonus						
---	--	--	--	--	--	--	--

2. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X₁)

No.	Sistem Pengendalian Internal	1	2	3	4	5
1	Di lingkungan instansi tempat saya bekerja, terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas					
2	Di instansi tempat saya bekerja, bila laporan keuangan perlu segera diterbitkan, maka otorisasi transaksi harus dilaksanakan dan bukti pendukung harus disertakan.					
3	Di instansi tempat saya bekerja, telah ditetapkan peraturan untuk pemeriksaan fisik atas kekayaan instansi (kas, persediaan dan lain-lain).					
4	Di instansi tempat saya bekerja seluruh informasi kegiatan operasional instansi harus dicatat dalam sistem.					
5	Di instansi tempat saya bekerja diterapkan peraturan untuk dilakukannya pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan pengendalian internal (misalnya, derajat keamanan kas, persediaan dsb).					
6	Di instansi tempat saya bekerja, penerapan wewenang dan tanggung jawab tidak terlalu dipentingkan.					

3. Variabel Peluang (X_2)

No.	Peluang	1	2	3	4	5
1	Di instansi tempat saya bekerja, pimpinan jarang memeriksa laporan yang saya buat sehingga mendorong saya melakukan kecurangan					
2	Pimpinan di instansi tempat saya bekerja tidak mencurigai ketika terjadi kesalahan laporan					
3	Di instansi saya pelaku kecurangan hanya mendapat teguran					
4	Di instansi tempat saya bekerja, pimpinan tidak curiga saat saya melakukan kesalahan pencatatan					
5	Saya tidak tahu hukuman bagi pelaku kecurangan, sehingga hal tersebut mendorong saya untuk melakukan perbuatan curang.					
6	Di instansi tempat saya bekerja, Pimpinan tidak pernah/jarang memeriksa laporan hasil pekerjaan pegawai satu persatu					

4. Variabel Moralitas Individu (X_3)

Petunjuk : Untuk menjawab nomor 1 sampai dengan nomor 6 di halaman berikutnya, Bapak/Ibu/Saudara/i akan diberikan kasus yang tidak terjadi sebenarnya. Berikan jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/i paling tepat.

KASUS

Tiga bulan yang lalu Amir Mandala, Ak pindah dari Dinas Perhubungan ke Dinas Pekerjaan Umum. Tetapi tetap sebagai staf akuntansi. Selama tiga tahun laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum diaudit oleh BPK. Hasil audit selalu memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selama tiga bulan bekerja di Dinas Pekerjaan Umum. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belum memperlihatkan keadaan yang sebenarnya. Masih terdapat beberapa program yang tidak jalan, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi batas anggaran tapi program pembangunan belum sepenuhnya berjalan.

Mengetahui hal ini, Amir Mandala, Ak menyampaikan permasalahan tersebut kepada pimpinanya. Namun pimpinanya meminta kepada Amir Mandala, Ak. untuk tidak mengubah proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang telah berjalan. Amir Mandala, Ak. diminta untuk menyelesaikan Laporan Realisasi Anggaran tersebut dengan tetap menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran telah digunakan dengan sebaik baiknya dan pembangunan telah dilakukan dengan semestinya. Pimpinan juga menyatakan akan memberikan bonus pada Amir Mandala, Ak. serta janji untuk dipromosikan.

Amir Mandala, Ak. Menyarankan agar pimpinanya mempertimbangkan untuk menunjukan gambaran kegiatan pembangunan yang telah tercapai, dan agar

tidak terkena sanksi Undang-Undang, termasuk agar mempertimbangkan prinsip kesejahteraan masyarakat, serta tidak merugikan para pegawai lainnya.

Nilailah keputusan pimpinan tempat Bapak/Ibu/Saudara/i bekerja bila kondisi yang dihadapi oleh Amir Mandala, Ak. terjadi di OPD tempat Bapak/Ibu/Saudara/i bekerja.

No.	Moralitas Individu	1	2	3	4	5
1	Pimpinan OPD tetap menyelesaikan Laporan Realisasi Anggaran seperti periode yang lalu untuk kepentingannya.					
2	Pimpinan OPD memberikan bonus pada staf akuntansinya karena patuh.					
3	Pimpinan OPD tetap menyuruh staf akuntansinya untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti periode yang lalu agar kinerjanya bagus dan terlihat baik					
4	Pimpinan OPD menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti periode yang lalu, karena sudah menjadi kelaziman di OPD-nya.					
5	Pimpinan OPD menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti yang sebenarnya, karena pimpinan takut terkena sanksi Undang-Undang.					
6	Pimpinan OPD menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti kondisi yang sebenarnya demi mempertimbangkan prinsip kesejahteraan masyarakat serta tidak merugikan pemerintah.					

5. Variabel Penegakan Hukum (X_4)

No.	Penegakan Hukum	1	2	3	4	5
1	Saya merasa pejabat penerima tanggap dalam penanganan kejadian.					
2	Saya merasa proses penegakan hukum dalam organisasi ini selesai tepat waktu.					
3	Keputusan pengadilan sesuai dengan fakta-fakta hukum.					
4	Di instansi tempat saya bekerja, ada aturan-aturan hukum yang berlaku.					
5	Di instansi tempat saya bekerja, aturan- aturan hukum yang berlaku dijalankan dengan baik.					

6. Variabel Gaya Kepemimpinan (X_5)

No.	Gaya Kepemimpinan	1	2	3	4	5
1	Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin mengakui dan menghargai bawahan.					
2	Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin menentukan tujuan yang realistis untuk instansi dan bagian.					
3	Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin menyampaikan dengan jelas arah dan tujuan yang diinginkan kepada bawahannya.					
4	Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin memberikan inspirasi kepada bawahan untuk					

memberi kontribusi lebih pada tugas pokoknya.

5

Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin memberi pujian dan penghargaan pada pegawai yang bekerja dan menyelesaikan tugas tepat waktu.



LAMPIRAN 2

REKAPITULASI RESPONDEN

REKAPITULASI KUESIONER RESPONDEN

NO	TOTAL					
	<i>Fraud</i> (Y)	Sistem Pengendalian Internal (X1)	Peluang (X2)	Moralitas Individu (X3)	Penegakan Hukum (X4)	Gaya Kepemimpinan (X5)
1	16	22	7	22	16	22
2	21	22	12	21	20	20
3	9	25	7	14	25	25
4	15	25	25	14	20	25
5	20	24	9	20	22	19
6	9	25	6	25	24	25
7	15	25	9	15	21	22
8	18	22	10	22	21	18
9	11	25	8	22	21	18
10	16	11	11	16	17	18
11	18	24	9	30	20	24
12	18	22	12	16	20	20
13	9	18	7	14	25	21
14	11	21	6	24	16	20
15	16	24	7	28	22	24
16	19	23	10	22	20	16
17	13	20	11	10	21	13
18	22	24	12	27	16	22
19	15	25	9	16	20	20
20	18	27	12	19	25	25
21	26	21	12	13	17	20
22	14	23	11	17	20	21
23	17	27	12	17	20	20
24	9	24	12	6	15	20
25	24	23	17	16	11	19
26	19	25	9	28	21	17
27	12	26	7	26	20	20
28	10	25	8	26	20	17
29	11	26	8	28	21	21
30	31	27	12	25	25	25
31	10	25	14	7	18	23
32	9	22	9	20	19	20
33	23	22	16	19	18	18
34	24	22	14	18	17	20

35	24	24	15	20	17	20
36	21	18	10	19	18	21
37	16	22	13	16	17	16
38	21	23	9	24	23	20
39	9	26	13	10	17	18
40	18	21	11	18	20	20
41	17	25	6	22	19	20
42	14	24	9	17	20	23
43	12	23	13	17	17	18
44	9	26	7	6	24	20
45	20	22	13	13	18	19
46	9	22	10	12	22	20
47	17	27	12	12	20	20
48	9	26	15	16	19	20
49	18	22	12	16	17	20
50	18	23	10	16	17	20
51	9	27	9	15	16	21
52	9	27	9	15	17	24
53	18	22	23	15	18	18
54	18	22	24	16	18	19
55	22	24	12	25	20	20
56	18	22	24	15	18	19
57	12	26	7	14	24	25
58	14	25	24	16	18	19
59	18	27	12	12	22	20
60	20	26	12	26	20	19
61	18	24	12	12	20	20
62	18	19	12	16	17	20
63	12	20	10	17	17	20
64	15	24	10	12	20	20
65	16	24	10	12	20	20
66	18	24	10	26	23	22
67	20	22	6	20	20	10
68	18	23	10	14	20	20
69	23	22	14	17	19	19
70	30	27	7	27	25	25
71	9	26	9	12	24	23
72	9	26	9	10	25	24
73	17	24	8	23	20	20
74	24	18	16	16	15	18
75	19	22	14	21	20	22
76	18	22	14	16	20	20



77	10	6	8	10	20	25
78	10	22	10	15	20	20
79	15	24	13	16	19	19
80	18	22	12	18	20	20
81	20	22	14	20	20	21
82	15	22	10	18	20	20
83	17	23	9	18	20	20
84	26	22	13	23	20	20
85	20	22	12	19	14	18
86	14	26	9	14	25	25
87	13	25	9	14	25	25
88	19	24	6	22	20	20
89	18	24	12	18	25	25
90	27	26	13	20	21	25
91	18	23	8	17	25	22
92	21	22	14	17	18	20
93	26	22	11	23	22	20
94	16	25	11	17	20	23
95	10	23	7	23	20	20
96	26	27	12	26	24	25
97	9	26	6	14	25	24

Kategorisasi deskripsi jawaban responden

NO	<i>Fraud</i> (Y)	Sistem Pengendalian Internal (X1)	Peluang (X2)	Moralitas Individu (X3)	Penegakan Hukum (X4)	Gaya Kepemimpinan (X5)
1	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
2	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
3	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	TINGGI
4	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	TINGGI
5	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
6	RENDAH	SEDANG	RENDAH	TINGGI	TINGGI	TINGGI
7	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
8	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
9	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
10	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
11	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	TINGGI
12	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
13	RENDAH	RENDAH	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG
14	SEDANG	SEDANG	RENDAH	TINGGI	RENDAH	SEDANG
15	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	TINGGI
16	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH
17	SEDANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	RENDAH
18	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	RENDAH	SEDANG
19	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
20	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	TINGGI	TINGGI
21	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
22	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
23	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
24	RENDAH	SEDANG	SEDANG	RENDAH	RENDAH	SEDANG
25	TINGGI	SEDANG	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG

26	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	RENDAH
27	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG
28	RENDAH	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	RENDAH
29	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG
30	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI
31	RENDAH	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG
32	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
33	TINGGI	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
34	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
35	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
36	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
37	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH
38	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG
39	RENDAH	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG
40	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
41	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG
42	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
43	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
44	RENDAH	SEDANG	SEDANG	RENDAH	TINGGI	SEDANG
45	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
46	RENDAH	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG
47	SEDANG	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG
48	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
49	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
50	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
51	RENDAH	TINGGI	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
52	RENDAH	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI
53	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
54	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
55	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG
56	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
57	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	TINGGI
58	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
59	SEDANG	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG
60	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG
61	SEDANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG
62	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
63	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
64	SEDANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG
65	SEDANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG
66	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG
67	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG	RENDAH
68	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
69	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
70	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI
71	RENDAH	SEDANG	SEDANG	RENDAH	TINGGI	SEDANG
72	RENDAH	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	TINGGI
73	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
74	TINGGI	RENDAH	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG
75	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
76	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
77	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH	SEDANG	TINGGI
78	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
79	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
80	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
81	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
82	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
83	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
84	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
85	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
86	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	TINGGI
87	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	TINGGI
88	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG
89	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	TINGGI
90	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI
91	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG

92	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
93	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
94	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
95	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
96	TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI	TINGGI
97	RENDAH	SEDANG	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TINGGI



LAMPIRAN 3

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Variabel *Fraud* (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,844	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
F.P1	13,94	20,996	,616	,823
F.P2	14,36	23,215	,658	,820
F.P3	14,00	22,204	,528	,833
F.P4	14,24	23,900	,560	,829
F.P5	14,24	23,615	,510	,833
F.P6	14,44	24,251	,494	,834
F.P7	14,20	21,837	,636	,819
F.P8	14,50	23,929	,703	,821
F.P9	14,08	22,891	,467	,840

Variabel Sistem Pengendalian Internal (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,777	6

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SIP.P1	21,45	8,711	,565	,733
SIP.P2	21,41	9,163	,734	,708
SIP.P3	21,51	9,422	,681	,720
SIP.P4	21,59	9,663	,646	,729
SIP.P5	21,55	9,294	,647	,722
SIP.P6	21,78	7,969	,322	,868

Variabel Peluang (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,801	6

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P.P1	9,26	8,441	,669	,749
P.P2	8,94	8,466	,609	,760
P.P3	8,80	8,000	,554	,771
P.P4	9,00	9,184	,482	,786
P.P5	9,12	8,761	,559	,771
P.P6	8,68	7,120	,559	,783

Variabel Moralitas Individu (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,862	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
MI.P1	15,84	24,341	,707	,830
MI.P2	15,76	23,084	,697	,832
MI.P3	15,62	21,547	,830	,804
MI.P4	15,64	21,868	,821	,806
MI.P5	14,66	27,290	,460	,870
MI.P6	14,18	28,069	,421	,875

Variabel Penegakan Hukum (X4)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,813	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PH.P1	15,72	5,798	,462	,821
PH.P2	15,88	5,047	,663	,758
PH.P3	15,66	5,453	,672	,757
PH.P4	15,40	5,755	,572	,785
PH.P5	15,66	5,576	,667	,760

Variabel Gaya Kepemimpinan (X5)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,786	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
GP.P1	16,10	4,133	,698	,703
GP.P2	16,24	4,309	,612	,731
GP.P3	16,16	4,219	,619	,728
GP.P4	16,18	4,477	,526	,758
GP.P5	16,36	4,439	,403	,807



LAMPIRAN 4

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,38442588
Most Extreme Differences	Absolute	,059
	Positive	,049
	Negative	-,059
Test Statistic		,059
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.



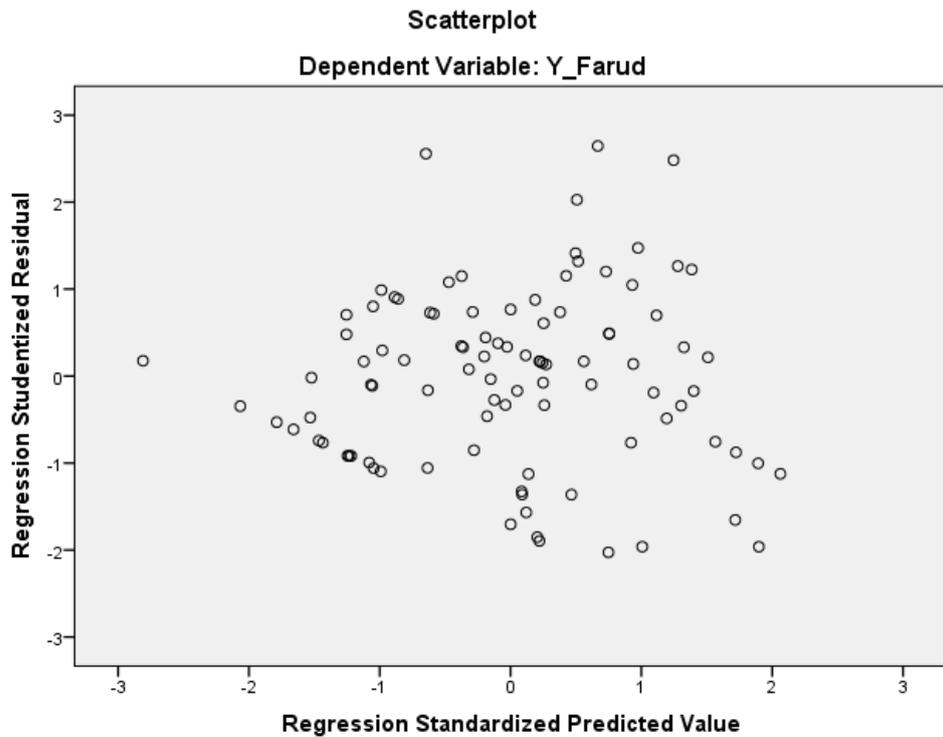
2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	4,244	5,511		,770	,443		
X1_SPI	-,163	,162	-,094	-1,009	,316	,870	1,150
X2_Peluang	,546	,130	,407	4,216	,000	,810	1,235
X3_Moralitas	,505	,091	,496	5,527	,000	,934	1,070
X4_Hukum	,094	,203	,051	,466	,642	,633	1,579
X5_Kepemimpinan	-,043	,198	-,022	-,219	,827	,760	1,316

a. Dependent Variable: Y_Farud

3. Uji Heterokedastisitas



LAMPIRAN 5

HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,561 ^a	,314	,277	4,503
a. Predictors: (Constant), X5_Kepemimpinan, X3_Moralitas, X2_Peluang, X1_SPI, X4_Hukum				
b. Dependent Variable: Y_Farud				

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	4,244	5,511		,770	,443		
X1_SPI	-,163	,162	-,094	-1,009	,316	,870	1,150
X2_Peluang	,546	,130	,407	4,216	,000	,810	1,235
X3_Moralitas	,505	,091	,496	5,527	,000	,934	1,070
X4_Hukum	,094	,203	,051	,466	,642	,633	1,579
X5_Kepemimpinan	-,043	,198	-,022	-,219	,827	,760	1,316

a. Dependent Variable: Y_Farud

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	8,26	22,72	16,60	2,968	97
Std. Predicted Value	-2,810	2,063	,000	1,000	97
Standard Error of Predicted Value	,475	3,067	1,041	,414	97
Adjusted Predicted Value	8,15	23,48	16,66	3,019	97
Residual	-8,818	11,423	,000	4,384	97
Std. Residual	-1,958	2,537	,000	,974	97
Stud. Residual	-2,027	2,645	-,007	1,010	97
Deleted Residual	-9,478	12,422	-,066	4,731	97

Stud. Deleted	-2,063	2,738	-,006	1,022	97
Residual					
Mahal. Distance	,078	43,543	4,948	5,686	97
Cook's Distance	,000	,162	,014	,027	97
Centered Leverage	,001	,454	,052	,059	97
Value					

a. Dependent Variable: Y_Farud

Frequency Table

Fraud

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	19	19.6	19.6	19.6
	Sedang	65	67.0	67.0	86.6
	Tinggi	13	13.4	13.4	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Sistem Pengendalian Internal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	5	5.2	5.2	5.2
	Sedang	83	85.6	85.6	90.7
	Tinggi	9	9.3	9.3	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Peluang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	6	6.2	6.2	6.2
	Sedang	83	85.6	85.6	91.8
	Tinggi	8	8.2	8.2	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Moralitas Individu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	15	15.5	15.5	15.5
	Sedang	67	69.1	69.1	84.5
	Tinggi	15	15.5	15.5	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Penegakan Hukum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	8	8.2	8.2	8.2
	Sedang	74	76.3	76.3	84.5
	Tinggi	15	15.5	15.5	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Gaya Kepemimpinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	6	6.2	6.2	6.2
	Sedang	73	75.3	75.3	81.4
	Tinggi	18	18.6	18.6	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

